HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
24 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

MINGGU, 1 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 32

OPINI

Gibran Lebih Baik Mundur Saja

Oleh Redaksi · 1 Nov, 07.09 WIB



Gibran Rakabuming Raka tampak fokus saat menjalankan tugas resminya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

0leh: Rusdianto Samawa((Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram))

UTUSAN MA 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket Penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah, apakah otomatis dimakzulkan?

Putusan ini besar secara hukum: Baik Perdata dan Pidana. Bahkan, DPR memiliki Hak Penuh untuk segera sidang Paripurna pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena, telah memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan paripurna.

Dua lembaga peradilan hukum tertinggi di Indonesia, sudah memutuskan: Suket tidak Sah dan Suket Bukan Ijazah, alias Ijazah belum ditemukan.

Ternyata, negara dan struktur pemerintahan, mulai sadar bahwa masa 10 tahun Jokowi: Demokrasi terjual, tergadai, immorality, dan rusak.

DPR tidak perlu membuat angket untuk perpanjang masa jabatan Gibran. DPR segera agendakan Paripurna langsung untuk menggulingkan Wakil Presiden: Perusak Demokrasi Ini.

Berdasarkan pemberitaan Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.

Dengan Amar putusannya: "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya."

Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 ini menguji keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan No. 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka.

Selengkapnya di halaman 18 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
EKONOMI 16
OPINI 18
SPORT 20
Aneka Berita 22

OPINI

Dulu Melenggang Menuju Istana, Kini Konstitusi Menagih Jawaban: Ironi Jalan Politik Gibran



Oleh: Radit Fabian((Kadiv Analisis Hukum & Kebijakan Publik IMAMAH FH UII))

DA ironi yang menarik untuk direnungkan dalam perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menuju kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jalan menuju kekuasaan yang dahulu dipenuhi kontroversi hukum dan perdebatan konstitusional dalam ruang publik, kini kembali menjadi ruang pengujian …

Selengkapnya di halaman 18 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Survei IndocPolls Bandingkan Kinerja Teddy dan Nusron Wahid



JAKARTA — Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) merilis hasil survei mengenai penilaian publik terhadap kinerja menteri dan kepala badan setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan pada 15-20 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden dari 38 …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran



BANDA ACEH -Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dianggap tidak ada sejak awal setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Pandangan tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis merujuk putusan kasasi MA Nomor 742 …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengacara Tegaskan Gibran Tetap Wapres usai MA Batalkan Suket Ijazah, PDIP: Mau Belokkan Isu



BANDA ACEH - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli merespons pernyataan Pengacara Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi yang menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai Wakil Presiden.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

31 BERITA

NASIONAL

Pengacara Tegaskan Gibran Tetap Wapres usai MA Batalkan Suket Ijazah, PDIP: Mau Belokkan Isu

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.08 WIB



BANDA ACEH - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli merespons pernyataan Pengacara Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi yang menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai Wakil Presiden.

Guntur menilai, putusan MA tersebut menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal, bukan sekadar membatalkan dokumen tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat berlaku surut atau retroaktif.

"Putusan MA itu menyatakan "tidak sah dan batal" bukan "membatalkan" atau "dibatalkan", istilah pertama kalau pakai latin "ex tunc", berlaku retroaktif, mundur ke belakang. Sejak Suket itu diterbitkan tahun 2019. Kalau yang kedua, istilahnya ex nunc, berlaku prospektif, ke depan," ujar Guntur saat dihubungi, Minggu (1/11/2026).

Guntur menilai, Rullyandi berupaya membelokkan isu dan substansi putusan MA. Dia menegaskan, putusan tersebut berlaku retroaktif sejak surat keterangan itu diterbitkan.

"PH Gibran itu mau membelokkan isu saja. Sudah jelas-jelas putusan MA itu "tidak sah dan batal" ex tunc berlaku retroaktif, mundur ke belakang, sejak Suket itu diterbitkan," tuturnya.

Kendati demikian, Guntur menilai, putusan MA itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memakzulkan Gibran.

"Menjadi landasan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sejak awal," ucapnya.

Sebelumnya, Pengacara Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA tak pengaruhi posisi kliennya dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

"Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 tidak mempengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres," ujar Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).

Hal itu dilandasi lantaran putusan MA tersebut tak sempurna untuk dilaksanakan eksekusi. Pasalnya, kata dia, ada keadaan hukum saat putusan itu diambil.

"Adapun keadaan yang dimaksud yakni MA memutuskan setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden dilakukan. Sehingga Putusan MA ini tidak berlaku surut atau tak bersifat retroaktif," ujar Rullyandi

Menurutnya, putusan MA itu telah memenuhi kualifikasi dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu merujuk pada Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya putusan yang tidak sempurna, maka tidak bisa dilaksanakan karena telah terjadi keadaan hukum sebelumnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.04 WIB



BANDA ACEH -Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dianggap tidak ada sejak awal setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Pandangan tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis merujuk putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

“Dalam ilmu hukum administrasi negara, batal demi hukum itu menunjuk bahwa surat tersebut harus dianggap tidak ada sejak awal. Dalam istilah teknisnya disebut ex tunc,” kata Margarito dikutip Minggu, 1 November 2026.

Menurut dia, konsekuensi hukum tersebut harus dibaca berdasarkan prinsip hukum administrasi negara, bukan ditarik ke dalam kepentingan Politik. Margarito kemudian mempertanyakan implikasi keberadaan surat yang telah dinyatakan tidak sah terhadap pemenuhan persyaratan administrasi yang sebelumnya menggunakan dokumen tersebut.

“Kalau tidak ada, bagaimana Anda pakai untuk mendaftar? Ya, tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Namun, Margarito juga menyoroti perintah MA agar surat keterangan tersebut ditarik dan dimusnahkan. Menurut dia, pelaksanaan perintah itu menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menerbitkan dokumen tersebut.

Ia menjelaskan, penarikan dapat dilakukan dengan meminta pihak yang menguasai dokumen untuk mengembalikannya atau dengan mengambil dokumen tersebut secara langsung.

“Dia serahkan atau tidak, soal lain. Dia serahkan atau tidak, tetap saja secara hukum surat ini dianggap tidak ada,” tegas Margarito.

Putusan kasasi MA tersebut merupakan hasil gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Meski demikian, objek yang secara langsung dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dalam perkara tersebut adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

NASIONAL

Jimly soal MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran: Tanya Pimpinan Parpol di DPR, Maunya Gimana?

Oleh Redaksi · 31 Okt, 16.14 WIB

BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Jimly menjelaskan, proses impeachment atau pemakzulan terhadap wapres yang sedang menjabat harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian Mahkamah Konstitusi (MK), dan dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, proses tersebut tidak diperlukan apabila pihak terkait secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kecuali jika yang bersangkutan secara sukarela mundur. Melalui proses impeachment, nanti akan ada pembuktian final lagi di MK mengenai ijazah dan sebagainya yang dinilai menjadi alasan untuk pemakzulan," kata Jimly saat dihubungi wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Dia menambahkan, pengajuan permohonan pemakzulan harus memenuhi persyaratan konstitusional.

"Syaratnya permohonan harus diajukan oleh DPR atas persetujuan 2/3 × 2/3," sambungnya.

Jimly menilai, apabila DPR benar-benar mengajukan perkara tersebut ke MK, hal itu akan menjadi catatan sejarah. Sebab, MK belum pernah menangani perkara pemakzulan sebagai bagian dari kewenangan konstitusionalnya.

"9 Hakim MK pasti senang membuat sejarah karena selama ini belum pernah menangani perkara impeachment yang menjadi kewenangan konstitusionalnya," ujarnya.

Meski demikian, Jimly menyebut langkah Politik terkait pemakzulan tersebut bergantung pada sikap pimpinan partai politik (parpol) yang memiliki perwakilan di parlemen.

"Tinggal Anda tanya saja kepada pimpinan 8 parpol di Senayan, maunya bagaimana," ucapnya

NASIONAL

Khozinudin cs Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara, Serahkan Surat Desakan soal Gibran

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.21 WIB

BANDA ACEH - Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat, Ahmad Khozinudin, menyerahkan surat berisi aspirasi agar Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Namun, surat tersebut hanya diterima petugas yang berjaga di kediaman Prabowo karena mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Penyerahan surat itu berlangsung saat Khozinudin bersama rombongan mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Denny Indrayana: Modal Gibran Untuk Mundur, Tahu Diri dan Tahu Malu

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.34 WIB

BANDA ACEH - Eks Wamenkumham, sekaligus penggugat ijazah Wakil Presiden RI di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Hal itu dikatakan oleh Denny Indrayana pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran tidak sah.

"Apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai Wakil Presiden. Untuk mundur, hanya 2 lagi modalnya, tahu diri dan tahu malu. Sdr Gibran bin Jokowi harus merenung, merefleksi karena surat keterangan (suket)nya pun sudah dibatalkan juga oleh MA," kata Denny dalam unggahan akun tiktok Arizona Siregar, Sabtu (31/10/2026).

PKS Dorong Pemimpin Dengan Kompetensi, Bukan Dispensasi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf, mengatakan, putusan MK terkait ijazah Gate dijadikan sebagai pintu gerbang untuk mengevaluasi pemilu ke depannya.

Selain itu, PKS juga menghormati putusan lembaga negara yang final dan mengikat dan di dalamnya jelas terselip satu persoalan yang sekarang rakyat banyak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Survei IndocPolls Bandingkan Kinerja Teddy dan Nusron Wahid

Oleh Van · 1 Nov, 17.54 WIB



JAKARTA — Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) merilis hasil survei mengenai penilaian publik terhadap kinerja menteri dan kepala badan setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan pada 15-20 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.

Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) mengatakan penilaian terhadap Teddy antara lain dikaitkan dengan posisi strategisnya sebagai Seskab yang berperan dalam koordinasi antara Presiden dengan jajaran menteri dan pejabat lainnya.

"Di tengah tantangan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah maupun langkah-langkah kebijakan yang diambil, Teddy berhasil menyelaraskan hingga mengkomunikasikannya kepada publik," kata Taufik.

Dalam hasil survei tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memperoleh angka penilaian 15,8 persen.

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh 13,6 persen.

Menurut Taufik, penilaian tersebut juga tidak terlepas dari popularitas Teddy yang telah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai Seskab.

Meski demikian, Taufik menyebut terdapat pula kritik terhadap cara Teddy menjalankan tugasnya.

Namun, berdasarkan survei IndocPolls, penilaian responden terhadap perannya dalam pemerintahan secara umum berada pada angka tersebut.

Amran dan Sejumlah Menteri Lain

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperoleh penilaian 13,6 persen dalam survei tersebut.

IndocPolls mengaitkan penilaian terhadap Amran dengan kinerjanya di sektor pertanian, terutama terkait produksi beras nasional dan serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menurut Taufik, pada pertengahan Juli 2026, CBP tercatat mencapai 5,4 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.

"Di tengah tantangan kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta serangkaian bencana, besarnya produksi beras memberikan penyangga bagi potensi penurunan pada tahun ini," ujar Taufik.

Selain Teddy dan Amran, survei tersebut juga mencatat sejumlah nama lain dengan persentase penilaian publik, antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebesar 6,5 persen, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 5,2 persen, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 3,8 persen.

Kemudian terdapat Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 3,5 persen, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 3,3 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 2,7 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 2,1 persen, serta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Waketum PSI Sebut Jika Jokowi Akan Hadiri Sidang Roy Suryo di PN Jaktim pada 5 November Mendatang

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.12 WIB



BANDA ACEH - - Presiden Indonesia ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menghadiri persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait tudingan ijazah palsu. Sidang dengan terdakwa Roy Suryo itu dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis (5/11).

Informasi mengenai rencana kehadiran Jokowi tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga, yang dikenal dengan sapaan Bro Ron. Dia membenarkan bahwa Jokowi disebut akan datang dalam persidangan yang menjerat Roy Suryo tersebut.

"Sidang Roy di PN Jaktim, Jokowi hadir," kata Bro Ron kepada JawaPos.com pada Minggu (1/11).

Dia juga menyampaikan, bukti-bukti terkait perkara tersebut telah diserahkan kepada penyidik kepolisian sejak beberapa waktu lalu. Saat ini, dokumen dan bukti soal ijazah Jokowi telah berada di tangan jaksa."Bukti-bukti sudah lama diserahkan ke reskrim dan sekarang ada di tangan jaksa," jelasnya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan tindakan yang dinilai menyerang kehormatan dan nama baik Joko Widodo melalui sarana teknologi informasi. Jaksa menilai tuduhan mengenai keaslian ijazah Jokowi disebarkan kepada khalayak tanpa dasar pembuktian yang sah.

Jaksa juga menilai penyebaran narasi tersebut dilakukan secara sengaja agar diketahui masyarakat luas. Meskipun menurut penilaian penuntut umum, tuduhan itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut bermula pada 26 Maret 2025. Saat itu, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, menemukan sejumlah konten digital di media sosial yang diunggah oleh Roy Suryo.

Dalam materi perkara, terdapat tiga unggahan yang menjadi bagian dari bukti yang diperiksa. Dua di antaranya berupa video di platform YouTube yang dinilai mendiskreditkan keabsahan dokumen akademik Jokowi.

Sementara itu, satu materi lainnya merupakan unggahan di media sosial X yang memuat narasi tuduhan serupa.

Secara garis besar, ketiga materi tersebut mempersoalkan keaslian ijazah Strata Satu (S-1) milik Jokowi dengan tuduhan bahwa dokumen tersebut palsu. Konten-konten itu kemudian menjadi bagian dari perkara hukum yang kini bergulir di PN Jaktim

NASIONAL

Pakar: Bola Pemakzulan Gibran Ada di DPR

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.27 WIB

BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Sugianto menilai, DPR memiliki peran penting dalam menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyetaraan ijazah SMA.

Sugianto berpandangan, persoalan tersebut tidak lagi sebatas polemik persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, persoalannya kini menyangkut legalitas jabatan wakil presiden dan kemungkinan pelanggaran konstitusi.

"Bola pemakzulan Wapres (Gibran) ada di DPR," kata Sugianto saat dimintai tanggapan oleh Monitorindonesia.com Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pendapat seorang pakar atau desakan Politik, melainkan harus melalui tahapan konstitusional.

Menurut Sugianto, DPR perlu terlebih dahulu menyikapi persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku sebelum prosesnya berlanjut ke MK dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pemakzulan itu bukan karena Prabowo, tetapi oleh DPR," ujarnya.

Sugianto juga menilai, Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil inisiatif politik dengan mengundang partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran untuk membahas polemik ijazah Gibran.

Guru Besar hukum tata negara itu berpandangan, partai politik (parpol) atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon memiliki peran dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Prabowo sebagai presiden bisa saja mengundang parpol pengusung untuk menyikapi dan membahas polemik ijazah Gibran ini," katanya.

Dengan demikian, Sugianto menegaskan bahwa keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden tidak berada di tangan Presiden Prabowo secara sepihak.

Ia merujuk mekanisme konstitusional yang mengharuskan DPR menyampaikan pendapat, kemudian MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum proses berlanjut ke MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Dalam pandangannya, Sugianto turut menyoroti persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pokok polemik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

KPU Perlu Keluarkan Surat Gibran Tidak Memenuhi Syarat Wapres

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.08 WIB

BANDA ACEH -Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden harus batal secara hukum.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal demi hukum.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Di mana dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

“Segera meminta kepada KPU mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pencalonan Saudara Gibran sebagai wakil presiden itu dinyatakan batal secara hukum,” tegas Ray kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Atas dasar itu, Ray berharap KPU harus sesegera mungkin menerbitkannya surat tersebut karena penyelenggara pemilu yang menyatakan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Selanjutnya, kata Ray, fraksi-fraksi partai Politik yang ada di DPR bisa segera mengambil …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Habib Syakur Sentil Raffi Ahmad: Jangan Menabrak Akal Sehat Rakyat!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.34 WIB



BANDA ACEH -Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik keras terhadap fenomena cancel culture yang menerpa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, yang digelar Polda Metro Jaya.

Menurut Habib Syakur, polemik tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh figur publik, terutama mereka yang kini berada di lingkaran pemerintahan, agar tidak sembarangan mengambil sikap maupun terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbenturan dengan akal sehat dan sensitivitas masyarakat.

Ia menilai, seorang figur publik tidak boleh hanya menghitung keuntungan popularitas ketika memutuskan untuk tampil dalam suatu kegiatan. Ada tanggung jawab moral dan persepsi publik yang harus dipertimbangkan, terlebih ketika figur tersebut memiliki pengaruh besar dan basis penggemar yang luas.

“Jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh dan tidak punya ingatan. Publik punya penilaian, punya nurani, dan punya batas toleransi. Ketika seorang figur publik mengambil langkah yang dianggap menabrak akal sehat masyarakat, jangan kaget kalau kepercayaan publik bisa berbalik menjadi penolakan,” tegas Habib Syakur, Minggu (1/11/2026).

Ia juga menyoroti konsekuensi ekonomi yang berpotensi mengikuti polemik tersebut. Menurutnya, dampak cancel culture tidak selalu berhenti pada hujatan di media sosial, tetapi bisa merembet ke reputasi, kerja sama komersial, hingga bisnis yang berkaitan dengan figur bersangkutan.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik keras terhadap fenomena cancel culture yang menerpa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, yang digelar Polda Metro Jaya.

Menurut Habib Syakur, polemik tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh figur publik, terutama mereka yang kini berada di lingkaran pemerintahan, agar tidak sembarangan mengambil sikap maupun terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbenturan dengan akal sehat dan sensitivitas masyarakat.

Ia menilai, seorang figur publik tidak boleh hanya menghitung keuntungan popularitas ketika memutuskan untuk tampil dalam suatu kegiatan. Ada tanggung jawab moral dan persepsi publik yang harus dipertimbangkan, terlebih ketika figur tersebut memiliki pengaruh besar dan basis penggemar yang luas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengacara Tegaskan Putusan MA Batalkan Suket Ijazah Tak Berlaku Surut: Gibran Tetap Wapres

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.17 WIB

BANDA ACEH - Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai wakil presiden (wapres).

"Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024 tidak mempengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres," ujar Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).

Rullyandi berpendapat, putusan MA tersebut tidak dapat dieksekusi secara sempurna karena terdapat keadaan hukum yang sudah berubah ketika putusan dijatuhkan.

Menurutnya, MA baru memutus perkara tersebut setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden. Karena itu, dia menilai putusan tersebut tidak berlaku surut atau bersifat retroaktif.

"Adapun keadaan yang dimaksud yakni MA memutuskan setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dilakukan. Sehingga Putusan MA ini tidak berlaku surut atau tak bersifat retroaktif," ujar Rullyandi.

Dia menilai putusan MA tersebut telah memenuhi kualifikasi dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rullyandi merujuk Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang, menurutnya, mengatur bahwa putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena telah terjadi perubahan keadaan hukum sebelumnya tidak dapat dieksekusi.

"Nah, telah terjadi keadaan hukum yang berubah yaitu disebabkan karena suket itu sudah digunakan untuk kepentingan pemilu pada saat itu, di mana tahapan pemilu sudah selesai. Putusan MA tersebut meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, namun tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, non-executable,” ucap Rullyandi.

Dia juga menilai putusan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan upaya Politik DPR dalam proses pemakzulan. Selain itu, menurutnya, masih terbuka upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) yang dapat ditempuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak tergugat.

"Yang tidak bisa juga dijadikan rujukan pelaksanaan eksekusi terhadap upaya politik DPR di ranah pemakzulan. Di samping itu juga Putusan MA masih terbuka ruang upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali yang dapat ditempuh Kemendikdasmen selaku pihak tergugat," imbuhnya.

MA Kabulkan Kasasi Gugatan Suket Gibran

Sebelumnya, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kuasa Hukum Gibran Dinilai Tak Cermat Sikapi Putusan MA Soal Surat Penyetaraan

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.38 WIB



BANDA ACEH - - Advokat asal Surabaya Wakit Nurohman menilai kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, kurang cermat dalam membaca konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi MA tersebut secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Wakit menanggapi klaim kuasa hukum Gibran yang menyebut putusan MA tidak dapat dieksekusi sempurna akibat perubahan keadaan hukum, tidak berlaku retroaktif, serta tidak relevan dijadikan rujukan Politik di DPR.

"Menurut saya, kuasa hukum Gibran kurang cermat. Jangan campuradukkan tiga persoalan berbeda, keabsahan surat penyetaraan, pemenuhan syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden. Putusan MA memang tidak serta-merta memberhentikan Gibran, tetapi bukan berarti akibat hukumnya menjadi tidak relevan," kata Wakit, Minggu (1/11).

Wakit menyoroti penerapan Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan istilah retroaktif yang disampaikan pihak Gibran. Menurutnya, MA tidak sedang membuat norma baru ke masa lalu, melainkan menguji keabsahan keputusan administrasi yang sejak awal digunakan sebagai basis pencalonan di Pemilu 2024.

Ia menyandingkan putusan MA ini dengan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu yang menyatakan tidak mendapatkan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang setara SMA.

"Sekarang MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setara SMA, lalu MA menyatakan surat penyetaraannya tidak sah dan batal demi hukum. Pertanyaannya sederhana, dokumen sah apa yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran pada saat pencalonan? Kalau ada, tunjukkan," tegasnya.

Terkait wacana Peninjauan Kembali (PK) yang akan ditempuh Kemendikdasmen, Wakit mengingatkan Pasal 66 ayat (2) UU MA menetapkan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Mengenai ruang gerak parlemen, Wakit menilai kesimpulan kuasa hukum Gibran yang menutup pintu pengawasan DPR terlalu dini.

Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit mencantumkan klausul 'Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden' sebagai dasar hukum yang dapat diproses melalui mekanisme konstitusional.

Wakit mendorong DPR untuk terlebih dahulu memanggil KPU serta Kemendikdasmen guna memverifikasi dokumen tanpa perlu terburu-buru menakut-nakuti publik dengan narasi pemakzulan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gumarang Soroti Perubahan Sikap Rocky Gerung Setelah Masuk Lingkaran Istana

Oleh Redaksi · 31 Okt, 16.10 WIB

BANDA ACEH -Perubahan sikap Politik Rocky Gerung yang selama ini dikenal lantang mengkritik pemerintah, mendadak menjadi sorotan setelah menjadi bagian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pengamat hukum dan kebijakan publik Muhammad Gumarang menilai posisi Rocky di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk menguji konsistensi kritik dan pandangan politiknya selama ini.

Menurut Gumarang, perjalanan Rocky memperlihatkan dinamika dari pengamat yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap penguasa hingga sosok yang kini disebut berada dalam lingkungan kekuasaan.

Ia menilai publik perlu mencermati apakah perubahan tersebut turut memengaruhi cara Rocky memandang kebijakan pemerintah.

“Namun kritik Rocky Gerung masih dinilai masih batas wajar dan landai-landai saja, tidak sebrutal dengan Presiden …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Budi Arie: Wapres Gibran tak akan Mundur, Suket Ijazah Hanya Soal Administrasi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 12.11 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Menurut Budi, putusan tersebut tidak akan membuat Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden."Nggaklah (mundur dari jabatannya). Itu kan cuma suket, surat keterangan tidak bisa diterima," kata Budi Arie saat mendampingi Jokowi bertemu relawan Gibran di Gedung Wanita, Manahan, Banjarsari, Sabtu (31/10/2026).

Budi menyebut persoalan tersebut merupakan masalah administrasi, bukan terkait pemilu. "Itu kan rezim administrasi negara, bukan rezim pemilu," ucapnya.

Meski begitu, mantan Menteri Koperasi itu menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA). "Kita menghormati lembaga hukum yang berwenang," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran 08, Andi Azwan juga merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan terkait pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan tersebut tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Andi menilai persoalan tersebut harus dilihat secara utuh. Dia menyebut ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden lulusan luar negeri telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3).

"Melihat persoalan ini, kita harus melihat secara utuh. Kalau untuk PKPU-nya, itu sudah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3). Lulusan luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan atau memiliki ijazah SMA atau sederajat," terangnya.

Andi menyinggung keputusan MK pada 2024 telah bersifat final dan mengikat. Dia juga menyinggung permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan yang meminta Gibran didiskualifikasi, tetapi tidak dikabulkan.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2024, setahu saya, juga sudah final and binding. Kemudian, hal itu diperkuat ketika para pemohon, Denny Indrayana dan kawan-kawan, meminta agar Mas Gibran didiskualifikasi. Permohonan itu juga dibatalkan oleh MK. Artinya, Mas Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden berdasarkan keputusan MK tersebut," katanya mengakhiri.

Pendapatan Mahfud

Pakar hukum tata negara Mahfud MD lewat kicauannya, Sabtu, ikut angkat bicara dalam polemik ijazah GIbran tersebut. Ia pun mengakui pascavonis MA tentang Suket Gibran ada yang bilang vonis itu berlaku ke depan (prospektif) dan ada yang berpendapat berlaku surut (retroaktif).

"Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah 'dibatalkan' atau MA 'membatalkan' artinya berlaku prospektif," ujar mantan Menko Polhukam tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jubir Gerindra: Putusan MA soal Gibran Harus Disikapi Serius

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.11 WIB

BANDA ACEH -Partai Gerindra menghormati sepenuhnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso bahkan menyebut putusan MA harus disikapi serius sesuai ketentuan hukum.

"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Kendati begitu, Sugiat mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh apa yang menjadi objek dari putusan MA tersebut. Termasuk, konsekuensi hukum dari keputusan MA mengabulkan kasasi gugatan Suket penyetaraan SMA milik Gibran.

"Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi objek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya," katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menjelaskan bila putusan MA itu berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian.

Sementara itu, kata dia, persoalan kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. Karena itu, keduanya tidak boleh serta-merta disamakan.

"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," katanya.

Menutup pernyataannya, Sugiat menegaskan Gerindra pada prinsipnya menghormati independensi lembaga peradilan, terutama MA. Gerindra memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," tegasnya.

MA mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Amar putusan tersebut dibacakan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2026, dan dikonfirmasi HM Subhan selaku penggugat dalam perkara tersebut …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Wasekjen Demokrat: Gibran Mundur atau DPR-MPR yang Memundurkan!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 11.13 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum mulai memunculkan persoalan serius mengenai pemenuhan syarat jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka menyampaikan pandangan hukumnya. Dia menilai putusan MA tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, bahkan membuka kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut Jansen, ada perbedaan mendasar antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dengan putusan MA yang baru keluar. Jika putusan MK masih menggunakan rumusan yang menurutnya menyisakan ruang penafsiran, putusan MA justru memiliki amar yang tegas mengenai status dokumen pendidikan Gibran.

“Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: belum ditemukan atau tidak ditemukan,” kata Jansen dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Namun, menurut dia, putusan MA memiliki rumusan yang jauh lebih jelas, yakni menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Jansen kemudian menghubungkan putusan MA tersebut dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalannya, Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh MA.

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat,” tegasnya.

Jansen bahkan menyebut, apabila amar putusan MA dibaca secara literal, status Gibran sebagai Wakil Presiden dapat dipersoalkan karena dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikannya telah dibatalkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

KPK Bergerak Usai Tetapkan Dedi Congor Tersangka, Dua Kantor Bea Cukai Digeledah

Oleh Van · 31 Okt, 17.47 WIB

Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam pengusutan dugaan korupsi di sektor cukai dengan menggeledah dua kantor Bea Cukai di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah pada Jumat (30/10/2026).

Dari kegiatan tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidik juga menyita sejumlah uang tunai yang nominalnya hingga kini masih dalam proses penghitungan.

“Hari ini Penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di wilayah Semarang. Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yakni di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah,” ujar Budi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo Tuai Kontroversi, Pengamat Desak Kapolri Bertindak Tegas

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.57 WIB



BANDA ACEH - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap santriwati Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.Amir menegaskan, seluruh personel kepolisian yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, maupun pelanggaran prosedur harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa karena menyangkut perlindungan perempuan, anak-anak, serta kehormatan lembaga pendidikan pesantren.

"Kapolri harus memberikan penjelasan secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosedur penggerebekan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, dan apakah tindakan anggota di lapangan sudah sesuai dengan aturan hukum," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Ahad (1/10/2026).

Ia menilai, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada keberanian pimpinan dalam mengungkap fakta dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

"Jangan sampai ada kesan institusi melindungi anggotanya sendiri ketika muncul dugaan tindakan represif terhadap masyarakat. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, semua pelaku harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang dilindungi," ujarnya.

Kasus ini bermula dari penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, pada Kamis (29/10/2026) dini hari.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pengurus pesantren dan diberitakan sejumlah media, penggerebekan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tidur.

Pihak pesantren menyebut terdapat sekitar 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun dan empat ustazah di lokasi.

Pengurus pesantren mengungkapkan dugaan pendobrakan pintu, pembentakan, intimidasi, hingga perlakuan tidak pantas terhadap sejumlah santriwati. Bahkan, terdapat keterangan mengenai seorang santriwati yang diduga disuruh tiarap dan mengalami perlakuan kasar.

Penggerebekan tersebut merupakan pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung mi babi di Sukoharjo.

Namun, keterangan pihak pesantren dan kepolisian mengenai pelaksanaan penggerebekan berbeda. Karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti, dokumen penggeledahan, rekaman, dan keterangan saksi.

Kontroversi penggerebekan tersebut juga mendapat perhatian sejumlah organisasi Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan tidak proporsional dalam penggerebekan tersebut.

MUI juga meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kronologi, serta prosedur penggeledahan dan pemeriksaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Hasto: Tidak Ada Kebohongan yang Abadi

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.16 WIB

BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal DPP PDIPHasto Kristiyanto menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Hasto menilai putusan tersebut memperkuat persoalan pemenuhan syarat pendidikan yang sejak awal menjadi sorotan partainya.

Menurut Hasto, putusan MA membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

"Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam Politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Dia mengatakan, putusan MA semakin memperkuat kritik yang selama ini disampaikan PDIP mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran. Hasto juga menyinggung keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan tersebut.

"Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," ujarnya.

Hasto menilai persoalan tersebut menyangkut hal mendasar karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Nah, sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," ucapnya.

Dia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Hasto juga menyinggung penggunaan bantuan sosial (bansos) pada akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Ditambah juga dengan adanya upaya intervensi kekuasaan sehingga akhirnya Saudara Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden, kemudian diikuti dengan abuse of power melalui bansos yang begitu besar yang menyebabkan fiskal pada masa Pak Prabowo ini mengalami kesulitan, diikuti dengan pengerahan parcok dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Sebelum Tabrak Belasan Orang di Halte Bekasi, Truk Molen Sempat Hantam Tembok Kampus

Oleh Redaksi · 1 Nov, 20.57 WIB



BANDA ACEH - Sopir truk molen bermuatan adukan semen sempat berupaya menghentikan kendaraannya dengan menabrakkan ke tembok gerbang Universitas BSI di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Namun, upaya tersebut gagal hingga truk terus melaju dan menghantam 12 orang yang sedang menunggu bus di halte, Minggu (1/11/2026) sore.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Rojali, menjelaskan kecelakaan terjadi pukul 16.30 WIB. Truk melaju dari arah Universitas Islam 45 (Unisma) menuju Rawa Panjang.

Saat melintasi turunan jembatan di depan Universitas BSI, sopir mengaku tidak mampu mengendalikan kendaraan karena sistem pengereman diduga mengalami gangguan.

"Si sopir menerangkan bahwasannya, sudah tidak bisa mengendalikan mobil. Penyebabnya adalah remnya sudah tidak bisa melakukan pengereman," kata Iptu Rojali di lokasi kejadian, dikutip dari iNews Bekasi, Minggu (1/11/2026).

Dalam kondisi tersebut, sopir mencoba menghentikan laju truk dengan menabrakkannya ke tembok gerbang kampus. Namun, kendaraan bermuatan adukan semen itu tetap melaju hingga akhirnya menabrak warga yang berada di halte.

"Korban saat kejadian memang sedang menunggu bis di halte," ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, 12 orang menjadi korban. Enam orang tewas, sedangkan enam lainnya mengalami luka-luka. Para korban terdiri atas laki-laki, perempuan, hingga anak-anak.

"Total korban ada dua belas, ada perempuan, laki-laki, hingga anak-anak," ucapnya.

Seluruh korban tewas dievakuasi ke dua rumah sakit. Satu korban dibawa ke RS Siloam Rawa Panjang dan lima lainnya ke RSUD Kota Bekasi.

Sementara itu, enam korban luka mendapatkan perawatan medis. Empat orang dirawat di RS Juwita dan dua lainnya di RS Siloam Rawa Panjang.

Polisi telah menahan sopir truk molen untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami penyebab kecelakaan, termasuk dugaan gangguan pada sistem pengereman kendaraan

NASIONAL

Setelah MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Desakan Mundur hingga Pemakzulan Menguat

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.19 WIB

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka langsung memantik desakan agar Wakil Presiden tersebut mundur. Sejumlah tokoh bahkan meminta DPR mulai menempuh proses pemakzulan.

Desakan tersebut datang dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Feri Amsari, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, serta advokat Ahmad Khozinudin.

Denny menilai putusan MA sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyinggung persoalan bukti pendidikan Gibran. Menurut dia, dua putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Jadi dua putusan Mahkamah ini sejalan menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai Wakil Presiden," katanya kepada media saat dihubungi, Jumat (30/10/2026) malam.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu pun meminta Gibran mundur. Ia menyebut pengunduran diri sebagai jalan terhormat agar polemik tersebut tidak terus berlarut.

"Karena itu, jalan terbaik bagi Gibran adalah mundur dan mundur adalah jalan terhormat. Dan mundur ini tidak menyandera Republik," ujarnya.

Ray Rangkuti juga meminta Gibran mundur. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar polemik ini tidak berkembang menjadi kegaduhan Politik berkepanjangan.

Tak hanya itu, Ray mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan surat pembatalan pencalonan Gibran sebagai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Sebut Kasasi Suket Gibran Bersinggungan dengan Konstitusi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.51 WIB



BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Sugianto menilai, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilihat dalam konteks persyaratan konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sugianto menyoroti konsekuensi putusan kasasi yang telah dijatuhkan MA dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026. Menurut dia, putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap menandai berakhirnya proses hukum pada tingkat tersebut.

"Mahkamah Agung itu putusan-putusannya sudah inkracht, sudah selesai. Kasasi inkrah," kata Sugianto kepada Monitor Indonesia.com Sabtu (31/10/2026).

Namun, ia menilai persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan konstitusi dan persyaratan pencalonan yang berlaku.

Sugianto menyinggung, Pasal 6A UUD 1945 dalam membahas kedudukan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Ia juga mempertanyakan aspek persyaratan pendidikan yang menjadi pokok polemik pencalonan Gibran.

"Kalau berbicara Pasal 6A, otomatis syarat-syarat itu tidak ditempuh, itu melanggar konstitusi," ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan polemik suket Gibran dalam perdebatan yang lebih luas, yakni hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan pencalonan, dan prinsip negara hukum.

Meski demikian, penilaian mengenai pelanggaran konstitusi tetap perlu diuji berdasarkan ketentuan persyaratan pencalonan yang relevan serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

Sementara, MK juga menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pada 6 Oktober 2026 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, MK juga menyatakan bahwa Certificate of Attendance yang digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan surat keterangan bukan merupakan bukti kelulusan.

Dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Untuk itu, ia mendorong partai Politik dan DPR menunjukkan sikap terhadap persoalan yang dinilainya berkaitan dengan konstitusi.

"Apakah kita bisa negara hukum? Ya (tentu), kita (juga) negara politik kalau saya melihat seperti itu," katanya.

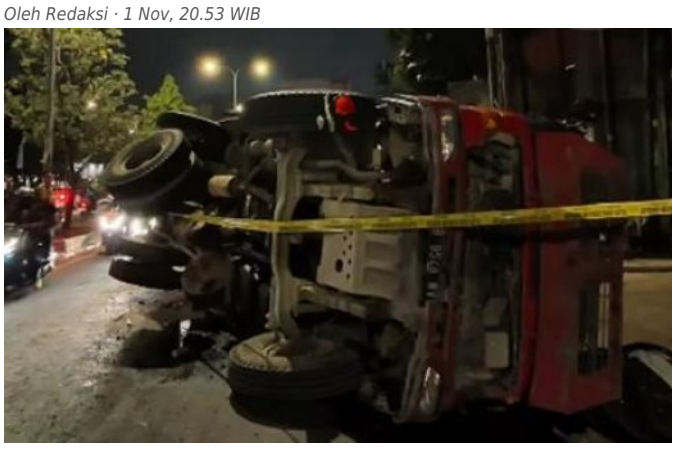
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kecelakaan Truk Molen Rem Blong Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Sopir Ditangkap

Oleh Redaksi · 1 Nov, 20.53 WIB



BANDA ACEH - - Kecelakaan maut melibatkan truk molen bermuatan adukan semen terjadi di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026) sore. Sebanyak enam orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Informasi kecelakaan tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram @ceritabekasi.co. Dalam unggahan itu disebutkan, insiden terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.

Polisi telah mengamankan sopir truk molen untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik masih mendalami penyebab kecelakaan, termasuk dugaan gangguan pada sistem pengereman kendaraan.

Hingga Minggu malam, truk molen yang terguling dilaporkan belum dievakuasi. Petugas masih melakukan pendataan terhadap para korban.

Sebelumnya dikabarkan, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Universitas Muhammadiyah Indonesia menuju Rawa Panjang. Saat melintasi turunan jembatan di depan Universitas BSI, kendaraan diduga mengalami gangguan pengereman hingga sopir kehilangan kendali.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Rojali mengatakan, berdasarkan keterangan awal, sopir mengaku tidak mampu menghentikan truk karena rem tidak berfungsi.

"Si sopir menerangkan bahwasannya, sudah tidak bisa mengendalikan mobil. Penyebabnya adalah remnya sudah tidak bisa melakukan pengereman," ucap Iptu Rojali di lokasi kejadian dikutip dari iNews Bekasi, Minggu (1/11/2026).

Sopir sempat berupaya menghentikan laju truk dengan menabrakkannya ke tembok gerbang Universitas BSI. Namun, upaya tersebut gagal. Truk tetap melaju hingga menghantam warga yang sedang menunggu bus di halte.

"Korban saat kejadian memang sedang menunggu bis di halte," tuturnya.

Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Enam korban meninggal dunia dibawa ke RS Siloam Rawa Panjang dan RSUD Kota Bekasi. Sementara itu, empat korban luka dirawat di RS Siloam Rawa Panjang

ISLAM

Karhutla Belum Berakhir

Oleh Nurjannah · 31 Okt, 20.50 WIB

APORAN terbaru dari lembaga think tank asal Helsinki, CREA mengungkapkan sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia menghirup udara beracun dengan tingkat kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya.

Pemburukan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mendorong perkiraan angka kematian hingga mencapai 3.560 kasus pada September 2026.

Studi CREA tersebut mengukur estimasi angka kematian akibat paparan partikel halus PM2.5 dalam jangka pendek atau hitungan hari.

Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga mampu menembus paru-paru hingga aliran darah.

Sebagian besar kematian akibat polusi asap karhutla tercatat terjadi di wilayah Kalimantan, Jawa, Sumatra, serta kawasan timur Indonesia.

Meskipun karhutla sudah berlangsung lama akan tetapi hingga hari ini api belum padam. Buktinya masih ada titik api di beberapa wilayah.

Di Papua per 29 Oktober masih tercatat 65 titik api.

Sementara itu jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional meningkat menjadi 154 titik pada Kamis (29/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Meski titik panas tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya hutan terbakar.

Tapi setidaknya ini menjadi gambaran bahwa persoalan titik api dan karhutla ternyata belum berakhir.

Padahal korban terus berjatuhan baik yang meninggal maupun yang akan merasakan efek jangka panjang karhuta.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 20 Agustus-20 Oktober 2026.

Sebanyak 71 ribu di antaranya merupakan korban balita.

Apakah negara kita tidak punya aturan tentang hutan dan lingkungan? Berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Negara memiliki kewajiban utama berkaitan dengan lingkungan dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MA Perkuat Putusan MK, PDIP Desak Gibran Segera Mundur!

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.10 WIB

BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira berpandangan bahwa jika penggunaan Suket penyetaraan ijazah setingkat SMA untuk pendaftaran Cawapres Gibran sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Maka, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu jelas dianggap tidak mengantongi tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah.

"Sehingga dengan keputusan MA ini semakin mempertegas bahwa yang bersangkutan memang tidak mempunyai tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP ini sejak awal adanya putusan MK sudah meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

"Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GGR (Gibran Rakabuming Raka) mundur," pungkasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Dalam petikan amar putusan yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

"Amar putusan: Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," seperti tertulis pada petikan amar putusan yang dikutip beberapa saat lalu.

Sementara itu, dalam perkara PHPU Pilpres 2024, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KOMUNITAS

Muskot V PMI Sabang Jadi Momentum Perkuat Organisasi dan Pelayanan Kemanusiaan

Oleh Redaksi · 31 Okt, 20.52 WIB

SABANG – Pemerintah Kota Sabang berharap Musyawarah Kota (Muskot) V Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sabang Tahun 2026 dapat melahirkan kepemimpinan yang amanah serta program kerja berkelanjutan guna memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang Rinaldi Syahputra saat membuka Muskot V PMI Kota Sabang yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Sabang, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PMI Kota Sabang yang juga merupakan Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, Ketua …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Tak Segera Mundur, Aktivis 98 Khawatir Muncul Kekacauan Nasional

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.59 WIB



BANDA ACEH - Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.Aktivis 98 Jayadi Santoso mengkhawatirkan persoalan tersebut berkembang menjadi krisis Politik dan memicu kekacauan nasional apabila Gibran tidak segera mengambil sikap atas putusan kedua lembaga peradilan tersebut.

“Rakyat di bawah mulai bergerak meminta Gibran mundur. Kalau tidak segera muncul dikhawatirkan muncul gerakan massa lebih besar dan bisa memunculkan kekacauan nasional,” kata Jayadi kepada wartawan, Ahad (1/11/2026).

Menurut Jayadi, keputusan MK dan MA telah menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi politik dan konstitusional jabatan wakil presiden.

“Karena itu perlu ada langkah politik dan ketatanegaraan untuk menyelesaikan polemik tersebut,” paparnya.

Jayadi berpandangan, setelah munculnya dua putusan tersebut, secara de facto kedudukan Gibran sebagai wakil presiden sudah kehilangan legitimasi. Ia khawatir ketidakjelasan penyelesaian persoalan ini akan memperbesar ketegangan politik dan menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan.

Ia juga mendesak DPR segera menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Selanjutnya, MPR didorong menjalankan kewenangan konstitusionalnya apabila proses hukum dan politik menyimpulkan terdapat alasan pemberhentian wakil presiden.

Bagi Jayadi, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata menyangkut masa depan politik Gibran, melainkan juga kepastian hukum dan stabilitas nasional.

Polemik ini bermula dari putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MK menyatakan:

“Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri.”

Namun, MK juga menegaskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.02 WIB



BANDA ACEH -Fenomena boikot atau cancel culture yang menimpa Raffi Ahmad (RANS) dan kreator konten Willie Salim menjadi pelajaran bagi pejabat maupun figur publik agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di ruang digital.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh menilai kemarahan publik terhadap keduanya tidak lepas dari kehadiran mereka dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut Rahmat, pejabat dan figur publik harus memiliki kepekaan lebih dalam menyikapi situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Terlebih, ketika publik sedang menghadapi persoalan sensitif seperti bencana lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Di era digital dan media sosial sekarang memang kita sebagai pejabat publik dan publik figur harus lebih hati-hati dalam bertindak, berucap, kemudian memberikan pernyataan," ujar Rahmat saat dihubungi Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengingatkan, tindakan maupun pernyataan yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat berpotensi memicu polemik dan menyinggung perasaan publik.

"Agar jangan menjadi isu sensitif yang bisa menyinggung masyarakat dalam kondisi sedang terjadi masalah lingkungan," katanya.

Rahmat mencontohkan situasi karhutla yang membuat masyarakat diliputi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti itu, figur publik dituntut lebih peka agar aktivitas maupun pernyataannya tidak dianggap mengabaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, kemarahan publik di era media sosial dapat berkembang menjadi aksi pemboikotan hingga pemberian sanksi sosial secara digital. Dampaknya bahkan tidak hanya dirasakan figur publik yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain yang terkait.

"Ini bisa berdampak terhadap aksi pemboikotan, kemudian memberikan sanksi digital terhadap publik figur dan bisa berdampak kepada masyarakat secara umum. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita," pungkas Rahmat.

LINGKUNGAN

19 Titik Longsor Terjang 5 Desa di Trenggalek, 103 Warga Terdampak

Oleh Van · 31 Okt, 20.31 WIB

JAWA TIMUR - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memicu tanah longsor di sejumlah wilayah Kecamatan Munjungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek mencatat sebanyak 19 titik longsor yang tersebar di lima desa hingga Sabtu (31/10/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Triadi Atmono dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) mengatakan pendataan dan penanganan masih dilakukan untuk mengetahui kondisi warga serta dampak kerusakan di lokasi terdampak.

Bencana tersebut berdampak terhadap 34 kepala keluarga (KK) atau 103 jiwa. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga sedang.

"Pendataan dan penanganan terus kami lakukan untuk memastikan kondisi warga serta dampak kerusakan akibat tanah longsor," tutur Triadi.

Berdasarkan data sementara BPBD Trenggalek, Desa Craken menjadi wilayah dengan titik longsor terbanyak.

Tercatat ada delapan titik longsor yang mengakibatkan 20 rumah mengalami kerusakan ringan.

Kemudian di Desa Masaran terdapat empat titik longsor dengan dampak lima rumah rusak ringan.

Sementara di Desa Munjungan, satu titik longsor berdampak terhadap dua rumah warga.

Di Desa Sobo, Kecamatan Munjungan, terdapat dua titik longsor yang mengakibatkan dua rumah mengalami kerusakan sedang.

Sedangkan di Desa Ngulungkulon, BPBD mencatat empat titik longsor dengan empat rumah mengalami kerusakan sedang.

"Di Desa Sobo ada dua titik longsor dan berdampak ke dua rumah, di Desa Ngulingkulon empat rumah terdampak tanah longsor, kerusakan sedang," papar Triadi.

Secara keseluruhan, 19 titik longsor tersebut tersebar di lima desa di Kecamatan Munjungan.

Dampaknya meliputi kerusakan rumah warga dengan kategori ringan hingga sedang serta puluhan keluarga yang terdampak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Binance Dibobol, Rp114 Triliun Aset Kripto Raib dalam Waktu 20 Menit

Oleh Van · 31 Okt, 20.25 WIB

BANDA ACEH - Bursa kripto Binance diguncang serangan siber besar setelah sekitar US$6,3 miliar atau setara Rp114 triliun aset kripto dicuri dalam sebuah insiden yang sebagian besar berlangsung hanya sekitar 20 menit.

Dilansir dalam keterangan resmi The Athletic pada Sabtu, (31/10/2026) peretasan tersebut menjadi salah satu insiden terbesar dalam sejarah aset digital.

Berdasarkan catatan blockchain, aktivitas transaksi mencurigakan mulai terdeteksi pada Kamis (29/10/2026) malam waktu setempat.

Sebagian besar pencurian berlangsung dalam rentang sekitar 20 menit. Analisis terhadap aktivitas blockchain juga menunjukkan adanya transaksi tidak biasa dari dompet yang terdampak.

Binance kemudian melakukan investigasi untuk mencari sumber serangan. Pada awalnya, perusahaan menduga insiden tersebut berkaitan dengan laptop yang telah disusupi.

Namun, penyelidikan lanjutan menemukan adanya titik masuk lain ke dalam sistem.

"Investigasi lanjutan kami telah menemukan titik-titik peretasan tambahan," tulis Binance dalam pernyataan resminya di platform X.

Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyebut serangan tersebut diduga menyasar infrastruktur signing Binance, yakni sistem yang digunakan untuk mengotorisasi transaksi.

Dengan akses tersebut, penyerang diduga dapat mengeluarkan instruksi untuk melakukan penarikan dari dompet yang terdampak.

Binance dalam pembaruan resminya menyatakan insiden tersebut menyebabkan sekitar US$6,3 miliar aset token terdampak. Perusahaan juga menyebut belum menemukan bukti bahwa private key dompet bocor.

Di tengah penyelidikan, Binance memastikan pengguna tidak akan menanggung kerugian akibat pencurian tersebut.

Binance menyatakan akan menanggung seluruh kerugian melalui Secure Asset Fund for Users (SAFU) dan dana perusahaan.

Dalam pembaruan 30 Oktober, Binance mengatakan telah menyiapkan lebih dari US$6,34 miliar dana perusahaan untuk menutup dampak insiden tersebut.

Sekitar US$5 miliar di antaranya sudah tersedia dalam aset token yang sesuai dengan aset yang terdampak.

Binance juga bekerja sama dengan perusahaan analisis blockchain, penerbit aset, aparat penegak hukum, dan sejumlah pihak lain untuk melacak dana hasil pencurian.

Sekitar US$3 miliar aset yang terdampak disebut telah berhasil dibekukan secara on-chain. Proses pelacakan dan pemulihan aset masih berlangsung.

Sebagai langkah pengamanan, Binance sempat menghentikan layanan penarikan untuk melakukan pemeriksaan keamanan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD: Putusan MA soal Suket Gibran Berlaku Surut

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.47 WIB



BANDA ACEH — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlaku surut atau retroaktif.

Mahfud mendasarkan penilaiannya pada penggunaan diksi dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, pilihan kata tersebut menunjukkan bahwa putusan masuk kategori ex-tunc, yakni berlaku surut, bukan ex-nunc yang berlaku ke depan.

"Ia (vonis MA) adalah ex-tunc artinya berlaku retroaktif," kata Mahfud melalui akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (31/10/2026).

Mahfud menjelaskan, perbedaan istilah dalam amar putusan memiliki konsekuensi terhadap penafsiran hukum. Jika putusan berlaku prospektif atau ex-nunc, menurut dia, diksi yang digunakan adalah "dibatalkan" atau "MA membatalkan". Sebaliknya, putusan yang berlaku surut atau ex-tunc menggunakan kata "batal".

"Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut (retroaktif), diksi amar putusan MA berbunyi 'batal' (bukan membatalkan)," tulisnya.

Berdasarkan penafsiran tersebut, Mahfud menilai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dianggap tidak pernah sah sejak awal.

"MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah," tandasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan informasi pada laman Kepaniteraan MA, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

"Kabul: Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian keterangan amar putusan yang tercantum di laman Kepaniteraan MA.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendy dan Hari Sugiharto. Adapun panitera penggantinya adalah Michael Renaldy Zein.

Perkara ini diajukan H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebelumnya, gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Dalam petitumnya, Subhan meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang memegangnya, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi bakal Bersaksi di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Bagaimana Persiapannya?

Oleh Redaksi · 1 Nov, 16.25 WIB



Presiden Joko Widodo tampil santai dengan kemeja putih dan topi putih di tengah suasana luar ruangan yang asri.

BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Dia akan memberi kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait tudingan ijazah palsu.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara mengonfirmasi jadwal kehadiran kliennya tersebut.

"Kamis 5 November Pak Jokowi dijadwalkan hadir di PN Jaktim," ujar Rivai saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2026).

Rivai menambahkan, Jokowi akan lebih dahulu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Roy Suryo. Setelah itu, dia juga akan bersaksi dalam persidangan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

"Ya di kedua sidang (Roy Suryo dan Dokter Tifa)," kata dia.

Dia menyebut, Jokowi tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi persidangan tersebut. Dia akan menyampaikan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, dilihat, dan didengarnya secara langsung.

"Tidak ada, mengalir saja. Karena beliau akan menerangkan fakta yang dialaminya, dilihat dan didengar langsung," tuturnya.

Sebelumnya, rencana pemanggilan Jokowi sebagai saksi disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum persidangan terdakwa Roy Suryo ditutup majelis hakim PN Jakarta Timur. Selain Jokowi, JPU juga berencana menghadirkan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah.

"Mohon izin, Yang Mulia. Eh kami akan melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Syarif Muhammad Fitriansyah," kata JPU dalam persidangan, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, JPU juga meminta agar pemeriksaan Jokowi dijadwalkan pada hari yang sama dengan persidangan Dokter Tifa.

"Kami memohon waktu agar disidangkan di hari yang sama dengan Tifa. Jadi penundaannya pada hari Kamis pada tanggal 5 November 2026 mengingat dengan acara keselamatan, Yang Mulia," kata JPU

ACEH

Hujan Deras dengan Intensitas Tinggi, Sejumlah Wilayah di Aceh Diterjang Banjir

Oleh Van · 31 Okt, 17.27 WIB

ACEH — Sejumlah wilayah di Aceh Selatan kini tengah menghadapi bencana banjir usai hujan dengan intensitas tinggi.

Banjir melanda Gampong Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah itu memiliki ketinggian air beragam, mulai dari 20 centimeter hingga 50 centimeter, sehingga membuat sebagian rumah terdampak dan membuat warga harus mengungsi.

Menurut catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan sebanyak 112 jiwa warga Gampong Cot Bayu dan Gampong Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah kini mengungsi akibat banjir.

“Kami meninjau beberapa titik banjir di Kecamatan Trumon Tengah serta membaca semua laporan, sehingga kami tetapkan status tanggap darurat banjir,” kata Bupati Aceh Mirwan MS kepada wartawan di Aceh Selatan pada Sabut, 31 Oktober 2026.

Status tanggap darurat tersebut akan berlaku selama 14 hari menyusul banjir yang terjadi.

“Saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran dan satuan tugas penanggulangan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” imbuhnya.

Selain di Aceh Selatan, Aceh Tenggara juga mengalami banjir hingga membuat jembatan di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam putus total.

Dalam video viral di media sosial, tampak akses jembatan putus karena terjangan banjir.

“Pagi ini, Sabtu, 31 Oktober 2026 jembatan di Desa Mbarung putus karena terjangan banjir dan luapan dari Sungai Lawe Atas,” tulis keterangan dalam unggahan akun Threads @zumaahmd pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Masih di Aceh Tenggara, Humas Polres Karo mengabarkan bahwa terjadi longsoran yang menutup Jalan Nasional Kabanjahe-Aceh Tenggara pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Longsoran tersebut terjadi karena hujan deras turun di wilayah Kecamatan Laubaleng.

“Materi longsor menutupi badan jalan, sehingga arus lalu lintas dari kedua arah tidak dapat dilalui kendaraan,” ungkap pihak Polres Karo pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Kemudian Gayo Lues juga sempat diterjang banjir dan angin puting beliung pada 28 Oktober 2026.

Derasnya hujan membuat Daerah Aliran Sungai (DAS) Dedep tak mampu menampung debit air hingga membuat sungai meluap.

Dalam salah satu video yang viral di media sosial, terlihat air berwarna coklat keruh dengan arus kuat membanjiri area permukiman warga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Dikepung Boikot, RANS Carnival Jogja Sepi, Musisi dan Tenant UMKM Mundur

Oleh Redaksi · 31 Okt, 19.31 WIB

YOGYAKARTA - RANS Carnival tak berjalan mulus di hari pertama.

Festival hiburan milik RANS Entertainment yang digelar di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (31/10/2026), terpantau sepi pengunjung.

Sejumlah stan UMKM juga kosong setelah tenant memilih batal berjualan.

Masalahnya tak hanya di area bazar. Panggung musik RANS Carnival juga kehilangan sejumlah pengisi acara. Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, hingga Orkes Melayu Wawes memutuskan mundur dari festival yang berlangsung selama dua hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026 itu.

Situasi ini terjadi di tengah seruan boikot terhadap RANS Carnival yang mencuat setelah Raffi Ahmad menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Kehadiran Raffi menuai kritik dan memicu perdebatan di media sosial.

Tipe-X menjadi salah satu grup musik yang mengumumkan pembatalan penampilan. Melalui akun media sosial resminya, Sabtu (31/10/2026), manajemen menyampaikan keputusan untuk mundur.

"Kita mundur dari acara ini. Sampai jumpa di lain pesta. Salam X," tulis manajemen Tipe-X.

Guyon Waton juga membatalkan penampilannya. Grup musik asal Kulon Progo itu menyebut keputusan diambil dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan hubungan baik dengan berbagai pihak.

Manajemen memastikan pembatalan bukan karena persoalan teknis maupun materi acara.

Orkes Melayu Wawes memilih mundur dengan mempertimbangkan situasi masyarakat Yogyakarta. Masdddho juga mengambil keputusan serupa.

Di luar panggung musik, sejumlah tenant UMKM ikut membatalkan keikutsertaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dorong Pemakzulan Gibran, Denny Indrayana Dinilai Lakukan Pemerasan Politik

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.39 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Persaudaraan 98, Wahab Talaohu menuding pakar hukum tata negara Denny Indrayana melakukan political blackmail atau pemerasan Politik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tuduhan itu dilontarkan menyusul pernyataan Denny yang mengaitkan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo.

Wahab menilai pernyataan Denny tersebut telah melampaui batas etika demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah yang dijamin konstitusi tetap harus disertai tanggung jawab intelektual serta penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

"Denny Indrayana melakukan political blackmail, yaitu penghasutan serta menebar ancaman yang bertentangan dengan hukum, melawan konstitusi, dan menghina mandat rakyat yang telah didelegasikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Wahab dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).

Polemik tersebut bermula saat Denny Indrayana menyampaikan pernyataan yang dinilai Wahab bernada ultimatum kepada kepala negara. Dalam video itu, Denny menyampaikan Prabowo berpotensi dimundurkan apabila Gibran tidak dilengserkan.

Wahab menegaskan, mandat kepemimpinan nasional yang diperoleh Prabowo dan Gibran berasal dari proses demokrasi konstitusional. Hal itu, kata dia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat serta Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

"Konstitusi bukanlah alat pemukul untuk meneror Presiden Prabowo, bukan pula instrumen untuk memaksakan kehendak. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki jabatan, pengaruh, dan gelar akademik profesor sekalipun," kata Wahab.

Dia menilai mandat tersebut tidak dapat dibatalkan hanya melalui tekanan individual ataupun kehendak kelompok tertentu. Menurutnya, setiap persoalan hukum yang diarahkan kepada pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Wahab pun mengingatkan bahwa mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Bahwa mekanisme pemakzulan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara jelas pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 melalui lembaga negara yang sah seperti DPR RI Mahkamah Konstitusi dan MPR, bukan berdasarkan syahwat politik figur tertentu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Wahab menyoroti tanggung jawab moral Denny sebagai akademisi bergelar profesor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Demokrat: Sejak Putusan MA, Kedudukan Gibran sebagai Wapres Tidak Sah, Batal Demi Hukum!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 11.42 WIB



BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.Benny mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai dampak hukum kedua putusan tersebut dari tokoh masyarakat dan aktivis mahasiswa saat melakukan kunjungan reses ke daerah.

Menanggapi pertanyaan itu, Benny menyampaikan bahwa apabila putusan MK dan MA benar-benar menunjukkan persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden, maka menurut penafsirannya terdapat konsekuensi terhadap keabsahan jabatan yang kini diemban Gibran.

"Apabila benar Putusan MK RI menyatakan Wapres RI Mas Gibran tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat saat pendaftaran sebagai Cawapres dan kini diperkuat lagi oleh Putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan terkait ijazah SLTA Wapres RI Mas Gibran yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah RI saat pendaftaran sebagai Cawapres RI tidak sah dan batal demi hukum, maka ada konsekuensi hukumnya," kata Benny.

Ia kemudian menyimpulkan bahwa berdasarkan dua putusan tersebut, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden juga tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan dua putusan itu maka kedudukan Mas Gibran sebagai Wapres juga tidak sah dan secara hukum pula otomatis batal. Bukan dibatalkan, namun batal demi hukum. Itu hukumnya. Itu aturannya," ujarnya.

Benny juga menanggapi pertanyaan mengenai kapan konsekuensi hukum tersebut berlaku. Menurut dia, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden menjadi tidak sah sejak putusan MA mengenai pembatalan surat keterangan dibacakan, kecuali terdapat ketentuan hukum lain yang mengatur berbeda.

"Sejak kapan kedudukan Wapres Mas Gibran tidak sah dan batal demi hukum? Tentu saja seturut hukum sejak putusan MA tentang pembatalan suket itu dibacakan, kecuali ada ketentuan lain," kata politikus senior Partai Demokrat tersebut.

EKONOMI

Seminggu IHSG Babak Belur, Duit Asing Justru Masuk ke Saham Ini

Oleh Van · 31 Okt, 17.55 WIB

Jakarta — IHSG sepekan Oktober 2026 mengalami tekanan besar dengan penurunan sekitar 7,03 persen. Namun, di tengah ramainya aksi jual, sejumlah saham justru masih diborong investor asing, termasuk GOTO dan BUMI.

Fenomena ini menarik perhatian karena menunjukkan bahwa pelemahan indeks tidak membuat seluruh saham ditinggalkan investor. Pada perdagangan Jumat, 30 Oktober 2026 sesi pertama, nilai pembelian bersih asing atau net buytercatat mencapai Rp253,09 miliar.

GOTO menjadi salah satu saham yang paling banyak dibeli bersih investor asing dengan nilai Rp70,10 miliar. BUMI menyusul dengan net buy Rp50,04 miliar.

IHSG Merah, GOTO dan BUMI Masih Diserok Asing

Sepanjang pekan perdagangan 26–30 Oktober 2026, IHSG bergerak melemah dari 5.439,26 pada penutupan 23 Oktober menjadi 5.057,05 pada akhir perdagangan 30 Oktober.

Tekanan tersebut terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap evaluasi MSCI dan persoalan transparansi kepemilikan saham di Indonesia.

Meski demikian, data perdagangan sesi pertama Jumat menunjukkan investor asing masih mengakumulasi sejumlah saham. Selain GOTO dan BUMI, saham BBNI, MDKA, PACK, CUAN, ASII, DEWA, BRMS, dan MBMA juga mencatat pembelian bersih.

Di sisi lain, beberapa saham justru mengalami tekanan jual asing. BBRI mencatat net sell Rp114,88 miliar, disusul AMMN sebesar Rp32,66 miliar dan ISAT Rp27,31 miliar.

Perbedaan arus transaksi tersebut memperlihatkan bahwa investor tidak mengambil keputusan yang sama terhadap seluruh saham. Ketika sebagian melepas kepemilikan, sebagian lainnya justru memanfaatkan pergerakan harga untuk masuk ke emiten tertentu.

Apakah Ini Sinyal Smart Money?

Aksi beli bersih investor asing kerap menjadi perhatian pelaku pasar karena dapat memberikan gambaran mengenai minat modal besar terhadap saham tertentu. Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah smart money.

Namun, net buy asing tidak otomatis berarti saham tersebut akan naik atau menjadi rekomendasi investasi. Data transaksi hanya menunjukkan selisih pembelian dan penjualan dalam periode tertentu, bukan alasan investor melakukan transaksi.

Karena itu, investor tetap perlu melihat faktor lain seperti kinerja keuangan emiten, valuasi, likuiditas, prospek bisnis, dan risiko pasar.

MSCI Jadi Momentum Pembenahan Pasar Modal

Tekanan terhadap IHSG juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kredibilitas pasar modal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Kunyit Jadi Harapan Baru, 17 Mahasiswa USK Disambut Hangat Warga Blang Tingkeum

Oleh Syarifudin Brutu · 31 Okt, 15.37 WIB

ACEH BESAR – Menjelang siang, gedung serbaguna PKK Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, mendadak ramai. Warga berkumpul. Di hadapan mereka, 17 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) berdiri dengan satu tujuan: tinggal sembilan hari di kampung ini dan mengubah kunyit menjadi peluang.

Sabtu (31/10/2026) pukul 11.00 WIB, para mahasiswa resmi diserahterimakan kepada pihak gampong. Dua dosen pembimbing, Dr. Risa Nursanty, M.Si dan Dr. Saudah, S.Pd, M.Si, mengantar langsung rombongan ke lokasi.

Mereka datang membawa program PKM Berdampak, Aksara Mahasiswa, DPPM BIMA 2026, dengan tajuk "Penerapan Teknologi Pengolahan Teh Herbal Berbasis Tumbuhan Obat Lokal untuk Penguatan Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Blang Tingkeum". Sasarannya jelas: kunyit yang tumbuh di tanah sendiri diolah menjadi teh herbal, sekaligus menggerakkan ekonomi warga.

"Kami Ingin Ada yang Ditinggalkan"

Bagi warga, kedatangan mahasiswa bukan sekadar kunjungan. Nuraini, istri Geuchik Gampong Blang Tingkeum, tak menyembunyikan rasa senangnya. Namun ia menitipkan satu pesan penting.

"Saya sangat senang dengan kedatangan mahasiswa kemari. Kami berharap ada sesuatu yang bisa ditinggalkan saat mahasiswa pulang dari kampung kami, entah kenang-kenangan atau produk hasil program ini yang bermanfaat dan berkelanjutan," ujarnya.

Harapan serupa datang dari seorang warga. Baginya, program ini bisa menjadi pintu perubahan.

"Semoga program dan kedatangan mahasiswa ke sini membawa perubahan, memajukan ekonomi, dan membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat," tuturnya.

Sembilan hari memang singkat. Tetapi di Blang Tingkeum, warga berharap yang tertinggal bukan hanya jejak kaki mahasiswa, melainkan sebuah produk dan usaha yang terus hidup setelah mereka pulang.(*)

NASIONAL

Nasib Gibran Kini di Tangan "Dewa-Dewa" DPR

Oleh Redaksi · 1 Nov, 08.55 WIB



BANDA ACEH -Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon, putusan MA tersebut memiliki amar yang tegas, mulai dari menyatakan surat keterangan tidak sah, batal demi hukum, hingga memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasai dan dimusnahkan.

Ia menilai kondisi tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang dinilainya masih menyisakan ruang penafsiran.

"Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: 'belum ditemukan atau tidak ditemukan'," kata Jansen lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Jansen mengatakan, putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum berimplikasi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Bahkan, amar putusan tersebut secara eksplisit memerintahkan agar surat keterangan itu dimusnahkan.

"Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat," tegasnya.

Jansen berpandangan, ada dua pilihan yang dapat ditempuh Gibran. Pertama, mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan Wakil Presiden. Kedua, DPR bersama MPR mengambil langkah Politik melalui mekanisme Pasal 7A UUD 1945.

"Jika letterlijk mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai," ujarnya.

Ia menambahkan, putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum tanpa tindak lanjut. Menurutnya, DPR bersama MPR memiliki peran apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri.

"Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja," jelasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Hukum Tata Negara Ultimatum Gibran Agar Mengundurkan Diri dalam Waktu 3×24 Jam!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 11.46 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Ahmad Yani mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dalam waktu 3 x 24 jam menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.Desakan tersebut disampaikan Ahmad Yani dalam dialog bersama jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (31/10/2026).

Ahmad Yani menilai putusan MA tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi, tetapi juga menyangkut proses pencalonan hingga pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Konsekuensinya, merujuk pada etika bernegara, tidak ada jalan lain yang lebih baik demi bangsa dan negara selain mengundurkan diri dalam waktu 3 x 24 jam serta siap menerima segala risiko," kata Ahmad Yani dalam dialog tersebut.

Dalam perbincangan itu, Ahmad Yani menyoroti dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.

Ia merujuk pada pertimbangan MK yang membahas bukti pendidikan Gibran. Menurut Ahmad Yani, MK sebelumnya telah menguraikan persoalan dokumen pendidikan yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.

Ia juga menyoroti putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Ahmad Yani menilai putusan tersebut berpengaruh terhadap dasar administrasi yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

EKONOMI

Update Tarif Listrik November 2026, Ini Penyebab Saldo Token Berbeda dari Nominal Pembelian

Oleh Van · 31 Okt, 16.10 WIB

Jakarta — Tarif listrik PLN November 2026 dipastikan tidak mengalami perubahan untuk seluruh golongan pelanggan, termasuk pada periode 2 hingga 8 November. Ketentuan tarif tersebut mengacu pada penyesuaian Triwulan IV 2026 yang berlaku Oktober hingga Desember.

Meski tarif per kWh tetap, pelanggan prabayar perlu memahami bahwa nominal pembelian token tidak seluruhnya dikonversikan menjadi energi listrik. Ada potongan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan biaya administrasi yang memengaruhi jumlah kWh yang diterima.

Tarif Listrik PLN November 2026 Tetap

Melalui laman resminya, PLN mencantumkan dokumen penyesuaian tarif untuk Triwulan IV 2026. Perusahaan menyebut tarif tenaga listrik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Penyesuaian tarif untuk golongan tertentu mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.

Dengan tarif yang tidak berubah pada triwulan tersebut, pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, hingga golongan lainnya tetap menggunakan ketentuan tarif yang sama selama November.

Mengapa Token Rp50.000 Tidak Sepenuhnya Menjadi kWh?

PLN menjelaskan bahwa pembelian listrik prabayar pada dasarnya merupakan pembelian energi dalam satuan kilowatt hour (kWh), bukan saldo rupiah seperti pulsa telepon seluler.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan mekanisme tersebut dalam keterangan resmi perusahaan.

"Pada sistem prabayar, pelanggan membeli alokasi energi listrik dalam jumlah tertentu. Alokasi ini digunakan oleh seluruh peralatan listrik di rumah dan akan berkurang seiring pemakaian. Karena itu, total energi tersedia dalam satuan kilowatt hour (kWh)," ujar Gregorius.

Dalam setiap transaksi token, terdapat komponen yang dipotong sebelum nominal pembelian dikonversikan menjadi kWh. Komponen tersebut meliputi PPJ yang besarannya ditetapkan pemerintah daerah dan biaya administrasi sesuai kanal pembelian.

Artinya, pelanggan yang membeli token senilai Rp50.000 tidak otomatis memperoleh energi listrik senilai nominal tersebut setelah dikonversikan. Besaran kWh yang masuk ke meteran juga dipengaruhi golongan tarif dan ketentuan pajak daerah.

PLN memberikan contoh pembelian token Rp100.000 untuk pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA. Setelah dikurangi PPJ dan biaya administrasi, nilai yang dikonversikan menjadi energi listrik berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp94.000.

Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pembelian tersebut setara sekitar 63 hingga 65 kWh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sekda Kurdi Raih JAB Award 2026 atas Inovasi Birokrasi

Oleh Aceh Barat · 31 Okt, 16.35 WIB



Ketua JAB, Chaidir Azhar, menyerahkan penghargaan JAB Award 2026 kepada Sekda Aceh Barat, Dr. Kurdi,FOTO/ist

MEULABOH - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST., MT., MH., IPM., ASEAN Eng., meraih penghargaan JAB Award 2026 kategori Tokoh Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Jurnalis Aceh Barat (JAB), Chaidir Azhar, kepada Kurdi dalam malam puncak JAB Award 2026 di Aula Teuku Umar, Bapperida Aceh Barat, Jumat (30/10/2026) malam.

Kurdi dinilai berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), serta mendorong inovasi administrasi birokrasi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Selama berkarier sebagai ASN, Kurdi juga dikenal mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan dan mendukung pelaksanaan program …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Suket Ijazah Gibran Dinyatakan Tak Sah, Relawan: Tak Perlu Persoalkan Masalah Administrasi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 09.08 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Relawan GI-JOE (Gibran Joeara) Benny Parapat menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak sah tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, masalah tersebut hanya persoalan administrasi negara belaka.

"Itu tidak perlu kita persoalkan, masalah suket adalah masalah administrasi negara, masalah Mas Gibran adalah tugas negara, tidak bisa dicampuradukkan. Ini merupakan hal terpisah," ujar Benny di Solo, Jawa Tengah, dikutip Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, pihak yang mempersoalkan putusan MA itu memiliki kepentingan Politik. "Hanya orang-orang yang memiliki kepentingan politik tertentu yang ingin mencampuradukan untuk mencari keuntungan jangka pendek mereka," katanya.

Sementara itu, Bendahara Umum GI-JOE, Biko Sutanto menilai, persoalan syarat Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 tidak adil. Pasalnya, persoalan itu baru muncul beberapa waktu belakangan ini.

"Kalau saya lihat ini tidak fair, karena Mas Gibran sendiri sudah melewati beberapa tahapan. Baik itu di tingkat pada saat menjabat menjadi wali kota maupun di wapres, seharusnya ini sudah sudah final, bukan pada saat di tengah-tengah pemerintahan seperti ini ini digulirkan," ujar Biko di tempat yang sama.

Biko menilai, polemik keabsahan riwayat pendidikan Gibran akan menganggu stabilitas nasional. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada rakyat kecil.

"Akhirnya apa? Isu ini akan mengganggu stabilitas politik maupun ekonomi. Sedangkan Indonesia ini perlu membangun stabilitas politik dan ekonomi. Kasihan masyarakat kecil kalau kita disuguhi seperti ini terus," ujar Biko.

Biko berharap, isu keabsahan riwayat pendidikan Gibran dapat dihentikan. "Saya hanya berharap elite-elite yang berada di atas yang yang menggoreng masalah ini, sudah, lupakan ini dulu. Kalau ingin menggoreng nanti 2029 ke atas," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diajukan HM Subhan. Putusan itu tertuang dalam Nomor 742 K/TUN/2026.

"Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

Adapun majelis hakim yang mengadili kasasi tersebut yakni Yulius selaku Ketua Majelis dengan masing-masing anggota Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto

NASIONAL

Andi Azwan Tegaskan Gibran Tetap Wapres yang Sah meski Ada Putusan MK dan MA, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 1 Nov, 09.11 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menurutnya, putusan itu tak mengubah hasil Pemilu 2024 dan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Dia menegaskan, Gibran yang merupakan lulusan luar negeri memang dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA atau tingkat setara saat mendaftar Pilpres 2024.

"Ya, jadi kita melihat begini, kita harus melihat secara utuh bahwasanya ya kalau untuk PKPU-nya itu kan sudah dijelaskan Pasal 18 ayat 3 ya. Kalau lulusan luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan atau memiliki ataupun ijazah SMA, setara SMA itu, tapi bisa menggunakan yang namanya ijazah tertinggi, baik S1, S2, dan S3, khusus untuk lulusan luar negeri," ujar Andi di Solo, Jawa Tengah, dikutip Minggu (1/11/2026).

Andi mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, MK juga telah menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dilayangkan Denny Indrayana cs beberapa waktu lalu, meski MK tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran.

"Jadi artinya Mas Gibran tetap sebagai wakil presiden dengan keputusan dari MK tersebut ya," ujar Andi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diajukan HM Subhan. Putusan itu tertuang dalam Nomor 742 K/TUN/2026.

"Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

Adapun majelis hakim yang mengadili kasasi tersebut yakni Yulius selaku Ketua Majelis dengan masing-masing anggota Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto

ACEH

Bukan Sekadar Juara, MTQ ke-35 Aceh Besar Tinggalkan Kesan Mendalam bagi Peserta

Oleh Redaksi · 31 Okt, 15.02 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar menjadi momen membahagiakan bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi di masing-masing cabang perlombaan. Di balik pencapaian tersebut, tersimpan berbagai pengalaman, perjuangan, dan kesan tersendiri selama mengikuti ajang keagamaan yang berlangsung di Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Jumat (30/10/2026).

Bagi para peserta, keberhasilan meraih juara bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi juga menjadi pengalaman yang membanggakan dan berkesan. Ajang tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan peserta lain sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik dalam bidang Al-Qur'an.

Salah satu pengalaman tersebut dirasakan Razi Ukhrawi dari Kecamatan Krueng Barona Jaya yang berhasil meraih Juara I pada cabang Tilawah Dewasa Putra. Ia mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut.

Menurutnya, suasana perlombaan memberikan pengalaman berharga, terutama ketika berhadapan dengan peserta lain yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik.

"Perasaannya tentu sangat senang dan bersyukur. Apalagi bisa bertemu dengan banyak peserta yang memiliki kemampuan luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki bacaan dan meningkatkan kemampuan," ungkap Razi.

Kesan serupa juga dirasakan Cut Raisatul Haq dari Kecamatan Kota Jantho yang berhasil meraih Juara III pada cabang Tilawah Remaja Putri. Ia mengatakan, mengikuti MTQ ke-35 menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang.

Selain mempersiapkan diri untuk tampil, ia juga mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama mengikuti perlombaan.

"Bagi saya, MTQ ini sangat berkesan. Ada rasa gugup saat tampil, tetapi juga ada kebahagiaan karena bisa mengikuti perlombaan dan bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillah, bisa mendapatkan hasil yang baik menjadi kebahagiaan tersendiri," kata Cut Raisatul Haq.

Sementara itu, Dafiqi Rahmat dari Kecamatan Mesjid Raya, peserta cabang Tilawah Golongan Tunanetra Putra, mengaku sangat terharu dan bersyukur dapat mengikuti MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar.

Ia menyampaikan bahwa pencapaian dan pengalamannya selama mengikuti perlombaan tidak terlepas dari doa serta dukungan kedua orang tua, sahabat, tim ofisial, dan para pendamping yang telah membantu seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

"Masyaallah, tabarakallah, saya sangat terharu. Alhamdulillah, berkat doa kedua orang tua, dukungan sahabat-sahabat, tim official, para pendamping, serta semua pihak yang telah membantu dan mendampingi kami selama perlombaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pemkab Aceh Barat Dampingi Korban Perundungan

Oleh Aceh Barat · 31 Okt, 16.53 WIB



Situasi di dalam kantor DP3KAB saat proses administrasi atau pemeriksaan berlangsung, FOTO/ist

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan kepada anak korban dugaan kekerasan dan perundungan yang menjadi perhatian publik.

Kepala DP3AKB Aceh Barat, Mulyani, mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum serta mendapatkan layanan pemulihan yang dibutuhkan.

"Kami telah mendampingi anak korban saat menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Aceh Barat," kata Mulyani, Sabtu (31/10/2026).

Selain pendampingan hukum, Pemkab Aceh Barat akan memfasilitasi penggantian biaya visum yang sebelumnya dibayarkan orang tua korban.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Ditantang Tagih Empat Bank Swasta Penerima Obligasi Rekap

Oleh Redaksi · 1 Nov, 07.06 WIB



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tampak berwibawa saat memberikan arahan dalam sebuah pertemuan resmi.

BANDA ACEH- Ekonom InFast Bestari, Gede Sandra, mendesak negara menagih hak ekonominya dari empat bank swasta penerima obligasi rekapitalisasi perbankan, yakni BCA, Danamon, Permata, dan CIMB Niaga. Menurut perhitungannya, nilai dana yang diterima keempat bank itu mencapai sekitar Rp212 triliun.

"Saatnya negara dan rakyat meminta haknya kepada empat bank swasta yang saya sebutkan tadi. Ini sudah waktunya. Kita memiliki presiden yang berani untuk melakukan itu sekarang," tegas Gede dalam Podcast Forum Keadilan TV Madilog, dikutip Sabtu malam, 31 Oktober 2026.

Gede menyatakan dana tersebut merupakan beban penyelamatan perbankan pascakrisis moneter 1997-1998 yang akhirnya ditanggung negara lewat APBN. Beban itu dibayar bertahap menggunakan penerimaan negara, termasuk pajak, dan pembiayaan dari utang pemerintah.

"Yang menerima dana obligasi rekap ada BCA, Danamon, Permata, dan CIMB Niaga. Empat bank ini sekitar Rp212 triliun dan itu dibayar oleh rakyat," ujarnya.

Dari keempat bank itu, BCA disebut sebagai penerima terbesar. Gede menyebut dana rekapitalisasi BCA sekitar Rp60,8 triliun. Menurut hitungannya, nilai yang harus dibayar negara atas dana itu membengkak menjadi sekitar Rp161 triliun selama 1999–2020.

Rinciannya, BCA sekitar Rp161 triliun, Danamon Rp28 triliun, Permata Rp8,8 triliun, dan CIMB Niaga Rp14,3 triliun, sehingga totalnya sekitar Rp212,1 triliun.

"Kenapa kita bisa terus-menerus menyuntik bank yang sebenarnya sudah sehat sejak lama? Ratusan triliun lebih sudah dibayarkan, tetapi kita dulu hanya mendapatkan uang sekitar Rp5 triliun," jelasnya.

Gede juga menyoroti hilangnya kepemilikan saham negara di BCA. Ia menilai publik perlu bertanya mengapa negara kini tidak lagi memegang saham di bank itu, padahal pernah mengeluarkan dana besar untuk menyelamatkannya.

Pemerintah melalui BPPN sempat menguasai 92,8 persen saham BCA pada 1999, lalu mengurangi kepemilikan itu lewat sejumlah divestasi, termasuk penawaran kepada publik dan investor strategis.

Gede meminta pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian administrasi program rekapitalisasi. Menurutnya, perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan negara sudah memperoleh hak ekonominya secara proporsional.

Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa memakai momentum ini untuk membuka kembali persoalan tersebut.

Sebagaimana diketahui, obligasi rekap lahir dari krisis moneter 1997–1998. Pemerintah menerbitkannya pada 1998 kepada sejumlah bank pelat merah dan swasta, dan dana bunganya berasal dari APBN.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Legitimasi Gibran Sebagai Wapres Sudah Runtuh

Oleh Redaksi · 1 Nov, 16.20 WIB



Gibran Rakabuming Raka tampak sedang berbincang akrab dengan warga sembari membagikan susu kotak di tengah keramaian.

BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengguncang landasan legitimasi etika dan hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto menyebut persoalan pendidikan Gibran kini semakin terang setelah MA menyatakan surat keterangan (Suket) yang digunakan sebagai pengganti ijazah tidak lagi diakui keberadaannya.

Menurut Henri, persoalan tersebut tidak berhenti pada ranah administrasi. Ia menilai penerbitan Suket yang dianggap tidak sah juga berpotensi dibawa ke proses peradilan pidana.

"Sekarang dengan putusan MA itu, pembuatan Suket yang tidak sah tersebut bisa dibawa ke pengadilan pidana. Ini akan jadi persidangan serius," kata Henri lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengatakan, publik kini menunggu tindak lanjut atas putusan kedua lembaga yudikatif tersebut. Setidaknya, ada dua jalur yang menjadi perhatian, yakni kemungkinan langkah Politik melalui DPR atau proses hukum pidana.

"Dengan dua keputusan lembaga yudikatif tertinggi Negeri ini yaitu MK dan MA, maka Gibran sudah runtuh landasan legitimasi etika dan hukumnya sebagai Wakil Presiden RI. Hanya persoalan politik dan prosedur formal hukum yang belum mencopot jabatan Gibran dari kursi Wapres," ujarnya.

Henri juga mempertanyakan keberanian para elite politik, khususnya wakil rakyat di DPR, untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA.

"Kita lihat setelah ini, ada keberanian politik tidak dari para elit wakil rakyat menindak lanjuti putusan MK dan MA," tandasnya.

NASIONAL

Suket Gibran Jadi Bencana Politik Paling Dahsyat di Lingkar Istana

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.33 WIB



BANDA ACEH -Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan (Suket) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai Pengamat Politik Faizal Assegaf menjadi bencana Politik besar bagi lingkar Istana.

Bahkan, ia menilai persoalan tersebut bisa menjadi titik akhir bagi perjalanan politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tersebut,

"Suket Gibran menjadi bencana politik paling dahsyat di lingkar Istana. Game over," kata Faizal lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 1 November 2026.

Menurut Inisiator Partai Nasional Gotong Royong (Negoro) itu, desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden kini memasuki fase pertentangan politik yang semakin krusial dan sengit.

Ia menilai kubu Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi kini berada dalam kalkulasi politik yang serius menyikapi perkembangan tersebut.

Dinamika politik selanjutnya, kata Faizal, akan sangat ditentukan oleh pilihan kedua kubu, apakah menempuh jalan kompromi atau justru menghadapi benturan politik yang lebih keras.

"Desakan Gibran mundur kian memasuki orbit pertentangan krusial dan sengit. Kubu Prabowo & Jokowi berada dalam kalkulasi serius. Dinamika ke depan tergantung kompromi atau benturan keras," tandasnya.

MA sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah

ISLAM

MTQ ke-35 Aceh Besar Tinggalkan Kesan Mendalam bagi Para Peserta

Oleh Redaksi · 31 Okt, 15.02 WIB

KOTA JANTHO – Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar menjadi momen membahagiakan bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi di masing-masing cabang perlombaan.

Di balik pencapaian tersebut, tersimpan berbagai pengalaman, perjuangan, dan kesan tersendiri selama mengikuti ajang keagamaan yang berlangsung di Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Jumat (30/10/2026).

Bagi para peserta, keberhasilan meraih juara bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi juga menjadi pengalaman membanggakan dan berkesan.

Ajang tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu dengan peserta lain sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik dalam bidang Al-Qur'an.

Salah satunya dirasakan Razi Ukhrawi dari Kecamatan Kreung Barona Jaya yang berhasil meraih Juara I pada cabang Tilawah Dewasa Putra.

Ia mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut.

Menurutnya, suasana perlombaan memberikan pengalaman berharga, terutama saat berhadapan dengan peserta lain yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik.

"Perasaannya tentu sangat senang dan bersyukur. Apalagi bisa bertemu dengan banyak peserta yang memiliki kemampuan luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki bacaan dan meningkatkan kemampuan," ungkap Razi.

Kesan serupa juga dirasakan Cut Raisatul Haq dari Kecamatan Kota Jantho yang berhasil meraih Juara III pada cabang Tilawah Remaja Putri.

Ia mengatakan, mengikuti MTQ ke-35 menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang.

Selain mempersiapkan diri untuk tampil, ia juga mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama mengikuti perlombaan.

"Bagi saya, MTQ ini sangat berkesan. Ada rasa gugup saat tampil, tetapi juga ada kebahagiaan karena bisa mengikuti perlombaan dan bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillah, bisa mendapatkan hasil yang baik menjadi kebahagiaan tersendiri," kata Cut Raisatul Haq.

Sementara itu, Dafiqi Rahmat dari Kecamatan Mesjid Raya, peserta cabang Tilawah Golongan Tunanetra Putra, mengaku sangat terharu dan bersyukur dapat mengikuti MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar.

Ia menyampaikan bahwa pencapaian dan pengalamannya selama mengikuti perlombaan tidak terlepas dari doa serta dukungan kedua orang tua, sahabat, tim official, dan para pendamping yang telah membantu seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

"Masyaallah, tabarakallah, saya sangat terharu. Alhamdulillah, berkat doa kedua orang tua, dukungan sahabat-sahabat, tim official, para pendamping, serta semua pihak yang telah membantu dan mendampingi kami selama …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD: Pembuatan Suket Gibran dan Penyelundupan PKPU Harus Dipidanakan, KPU-Dikdasmen Perlu Diperiksa

Oleh Redaksi · 1 Nov, 09.15 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pembuatan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diproses secara pidana. Dia meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan dokumen tersebut segera diperiksa.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

Melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, Mahfud menegaskan persoalan penerbitan suket dan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 harus ditindaklanjuti melalui proses hukum pidana.

"Pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) harus diproses secara pidana. KPU dan Ditdikdasmen seharusnya segera diperiksa," ujar Mahfud, Sabtu (31/10/2026).

Mahfud juga memisahkan persoalan hukum penerbitan suket dengan keberlanjutan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, tindak lanjut terkait jabatan tersebut merupakan ranah politik.

"Vonis MA yang membatalkan Suket setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai wapres terserah kepada politik, mau pilih yang mana," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyoroti konsekuensi hukum putusan MA yang menggunakan amar kata "batal" terhadap suket Gibran. Dia menilai putusan tersebut berlaku surut atau retroaktif (ex-tunc).

Menurut Mahfud, terdapat perbedaan antara putusan yang berlaku ke depan (ex-nunc) dan berlaku surut (ex-tunc). Jika menggunakan istilah "membatalkan", akibat hukum berlaku sejak putusan dijatuhkan. Sementara itu, penggunaan kata "batal" menunjukkan dokumen dianggap tidak sah sejak awal.

"MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi gugatan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diajukan HM Subhan. Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

"Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

Putusan tersebut diadili majelis hakim yang dipimpin Yulius sebagai Ketua Majelis, dengan Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota

NASIONAL

Polda Metro Minta Maaf soal Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI hingga Undang Raffi Ahmad

Oleh Redaksi · 1 Nov, 12.18 WIB



BANDA ACEH - Polda Metro Jaya meminta maaf atas polemik kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang digelar di depan Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya menerima berbagai kritik dari masyarakat terkait kegiatan tersebut.

"Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi," ujar Budi dalam keterangannya dikutip pada Minggu (1/11).

Budi menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia". Sejumlah tokoh turut hadir, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, serta kreator konten, Willie Salim.

Ia mengatakan, Raffi dan Willie hadir atas undangan Polda Metro Jaya selaku penyelenggara.

"Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda," ujarnya.

Budi menambahkan, pihaknya menghormati aspirasi masyarakat dan akan menjadikan masukan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi.

"Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin kami jaga bersama seluruh elemen bangsa. Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik," tuturnya.

Adapun acara ini menjadi pembahasan di media sosial usai diduga menggunakan peserta mahasiswa palsu. Kegiatan ini juga diselenggarakan satu hari setelah penyampaian aspirasi mahasiswa di lokasi yang sama pada Rabu (28/10).

HIBURAN

Guyon Waton, Wawes hingga Tenant UMKM Mundur di RANS Festival, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.04 WIB

YOGYAKARTA - Penyelenggaraan RANS Festival di Maguwoharjo, Sleman,Yogyakarta, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 menuai sorotan.

Sejumlah pihak yang semula terlibat dalam acara tersebut memutuskan mundur, mulai dari pengisi acara musik, tenant UMKM, hingga pembawa acara (MC).

Dari enam penampil yang sebelumnya diproyeksikan meramaikan festival tersebut, tiga di antaranya memilih membatalkan keikutsertaan. Mereka adalah band asal Yogyakarta, Guyon Waton dan Wawes, serta musisi Masdho.

Menariknya, pengumuman mundur dari para musisi tersebut turut disertai simbol tiga hati berwarna hijau, biru, dan merah.

Para personel juga terlihat kompak menggunakan simbol serupa melalui kolom komentar maupun unggahan Instagram Story masing-masing.

Tiga warna tersebut diketahui menjadi simbol aksi yang digaungkan masyarakat Yogyakarta pada 28 Oktober 2026.

Penggunaan simbol itu pun membuat keputusan para penampil dikaitkan dengan situasi dan aspirasi yang berkembang di wilayah Yogyakarta.

Wawes secara terbuka menyampaikan alasan memilih tidak melanjutkan keterlibatan dalam acara tersebut.

Mereka mengaku tidak ingin keputusan untuk tampil justru melukai perasaan masyarakat.

"Kami tidak ingin melukai hati teman-teman semuanya," tulis Wawes.

Sementara itu, Masdho menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan urusan tampil di atas panggung.

"Bagi kami, musik bukan sekadar hiburan dan panggung bukan hanya tentang penampilan," tulis Masdho.

Guyon Waton turut memberikan penjelasan mengenai alasan pembatalan penampilan mereka.

Band asal Yogyakarta itu menekankan bahwa pertimbangan utama berkaitan dengan kondisi masyarakat serta situasi di sekitar penyelenggaraan acara.

"Pertimbangan utama kami bukan terkait materi acara melainkan lebih kepada aspek kondusivitas, keamanan masyarakat," kata Guyon Waton.

Gelombang pembatalan ternyata tidak hanya datang dari pengisi acara.

Salah satu tenant makanan dan minuman, Brokiss Jogja, juga mengumumkan keputusan membatalkan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Melalui media sosial, founder Brokiss Jogja menyapa warga Yogyakarta sekaligus menyampaikan bahwa dirinya bersama tim telah memutuskan tidak membuka tenant di acara itu.

"Hallo warga Jogja. Perkenalkan aku founder dari @brokissjogja salah satu tenant fnb yang ikut acara jajar*ns di sleman akhirnya aku dan tim memutuskan untuk CANCEL," tulisnya.

Pembatalan juga datang dari pembawa acara, Iben Khafiz Miraza.

Dia mengungkapkan sempat menerima tawaran menjadi MC untuk RANS Carnival Maguwoharjo yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.25 WIB



BANDA ACEH -Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut peringatan Yusril Ihza Mahendra terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 kini terbukti.

Said Didu mengingatkan, Yusril pada 17 Oktober 2023 pernah menyarankan agar Gibran tidak maju sebagai cawapres. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Gibran memenuhi syarat, Yusril menilai putusan tersebut problematik.

Namun, menurut Said Didu, sikap Yusril itu kemudian dikoreksi kembali pada 20 Desember 2023.

Kini, Said Didu menilai persoalan pencalonan Gibran semakin serius setelah muncul putusan dari dua lembaga hukum tertinggi, yakni MK dan Mahkamah Agung (MA).

"Dengan keputusan dua lembaga hukum tertinggi (MK dan MA) yang menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau setara, maka sudah dipastikan bahwa secara hukum Gibran tidak sah sebagai Wapres," kata Said Didu lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Ia pun meminta para politisi mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur Politik.

"Kita tunggu kewarasan para politisi untuk mengambil keputusan politik untuk tuntaskan penyelesaian masalah ini," tandasnya.

NASIONAL

PKS Minta DPR Segera Bentuk Pansus 'Ijazahgate' Buntut MA Batalkan Suket Gibran

Oleh Redaksi · 1 Nov, 07.02 WIB



Potret Gibran Rakabuming Raka yang disandingkan dengan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencerminkan dinamika politik di Indonesia.

BANDA ACEH -Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, minta DPR segera membentuk Pansus 'Ijazahgate' sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, DPR perlu mengambil langkah nyata karena menyangkut kepastian hukum dalam pemenuhan persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden.

"Putusan MA ini harus dihormati. Apalagi ini menyangkut dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden. Negara tidak boleh membiarkan persoalan hukum seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Harus ada tindak lanjut yang objektif, transparan, dan sesuai konstitusi oleh DPR," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 31 Oktober 2026.

Ia berpendapat pembatalan surat penyetaraan tersebut menegaskan kesimpulan MK sebelumnya dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2024. DPR secara konstitusional berkewenangan untuk menindaklanjuti kasus ini.

"Persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah surat dinyatakan sah atau tidak. Yang lebih mendasar adalah apakah persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Ini menyangkut integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara," tegas mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 tersebut.

Menurut Mulyanto dengan keputusan MA ini kasus terkait dengan tidak dipenuhinya persyaratan pendidikan cawapres saat Pilpres lalu sudah semakin jelas. Karenanya Rakyat menunggu DPR menjalankan tugas konstitusionalnya untuk menindaklanjuti kasus ini secara Politik ketatanegaraan dengan transparan dan tuntas.

"Logika masyarakat kan sederhana, kalau MK tidak menemukan ijazah SMA atau yang setara, dan sekarang MA menyatakan, bahwa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah, maka artinya persyaratan pencalonan Wapres Gibran yang lalu tidak sah," jelas Mulyanto.

"Jadi Pansus ijazah gate ini perlu segera dibentuk dan bersidang. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tandasnya.

NASIONAL

Pembatalan Suket Gibran oleh MA Perkara Besar

Oleh Redaksi · 1 Nov, 08.59 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, putusan MA tersebut memperkuat dasar bagi Komisi II untuk meminta KPU dan Bawaslu lebih teliti dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Baik putusan MK apalagi Suket yang dibatalkan MA. Ini perkara besar. Tapi beban pembuktian terbesar di Kemendikdasmen baru kemudian kawan-kawan KPU dan Bawaslu," kata Mardani lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, persoalan tersebut juga menunjukkan adanya proses yang tidak seksama dan cenderung ceroboh dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

Karena itu, Komisi II DPR perlu meminta penjelasan KPU terkait proses pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan yang sebelumnya menjadi dasar penerimaan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Komisi II DPR wajib meminta penjelasan KPU meskipun dimaklumi kawan-kawan KPU sudah mendapat SUKET yang dibatalkan MA," ujarnya.

Mardani menegaskan, putusan MA harus menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu agar lebih cermat dan berani mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku.

"Putusan MA memperkuat Komisi II untuk meminta KPU melakukan tugas dengan teliti dan berani membuat keputusan sesuai peraturan," tandasnya.

MA sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

SPORT

32 Klub Siap Bersaing di Kuta Gunong Cup 2026, Kick-Off 1 November

Oleh Redaksi · 31 Okt, 17.35 WIB

ACEH BESAR – Turnamen sepak bola Semi Open Kuta Gunong Cup 2026 siap bergulir.

Sebanyak 32 klub dari berbagai daerah di Aceh Besar dan Banda Aceh dipastikan ambil bagian dalam kompetisi yang memperebutkan total hadiah Rp45 juta tersebut.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai Minggu (1/11/2026) hingga 16 November 2026, bertempat di Lapangan Kuta Gunong FC, Gampong Jruek Bale–Jruek Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Pembukaan turnamen pada Minggu (1/11/2026) direncanakan dihadiri Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti yang sekaligus akan membuka secara resmi kompetisi tersebut.

General Manager (GM) Kuta Gunong, IPDA Agus Munawar kepada media ini, Sabtu (31/10/2026), mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen telah rampung 100 persen.

Menurutnya, panitia telah mematangkan berbagai kebutuhan teknis, mulai dari kesiapan lapangan, penyusunan jadwal pertandingan, hingga persiapan pelaksanaan kompetisi.

"Alhamdulillah, persiapan Kuta Gunong Cup 2026 sudah rampung 100 persen. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman dan sukses hingga pertandingan final," ujar IPDA Agus Munawar.

Ia menjelaskan, turnamen ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara dan hadiah, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar klub, membangun kebersamaan, serta mengembangkan potensi sepak bola di tengah masyarakat.

Selain itu, kompetisi tersebut diharapkan memberikan ruang kepada para pemain, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan bakat, meningkatkan kemampuan, dan mengasah mental bertanding.

Berdasarkan jadwal resmi panitia, Kuta Gunong Cup 2026 akan berlangsung selama 16 hari, mulai 1 hingga 16 November 2026.

Sebanyak 32 klub akan bersaing menggunakan sistem gugur. Setiap pertandingan menjadi penentu perjalanan tim untuk melaju ke babak berikutnya hingga mencapai partai final.

Persaingan diperkirakan berlangsung menarik karena peserta berasal dari sejumlah kecamatan di Aceh Besar serta beberapa wilayah di Banda Aceh.

Adapun 32 klub yang akan berlaga dalam Kuta Gunong Cup 2026 yakni:

- Lamsiteh Cot FC (Kuta Malaka)
- Lampoh Kawat FC (Montasik)
- Putra Lamteuba (Seulimeum)
- PSPL Limo FC (Indrapuri)
- Carlos Lhoknga (Lhoknga)
- Mitra SP 3 FC (Simpang Tiga)
- Anaconda FC (Darul Imarah)
- PSPP Grot (Indrapuri)
- TMC Lamnga Legend (Mesjid Raya)
- Krueng Raya FC (Mesjid Raya)
- Persakti Tibang (Syiah Kuala)
- Persib Baet FC (Sukamakmur)
- Kuta Gunong FC (Indrapuri)
- Porrkad 1972 FC (Pulo Aceh)
- Comet FC (Ingin Jaya)
- Badak Putih (Seulimeum)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Menunggu SBY Nyanyi "Kamu Gak Sendirian" untuk Jokowi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.21 WIB



BANDA ACEH -Pengamat komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi mulai kehilangan kedekatan dengan sejumlah tokoh politik.

Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, perubahan tersebut terlihat dari sikap sejumlah ketua umum partai politik yang kini mulai menjaga jarak.

Situasi ini, berlangsung di tengah persoalan keabsahan ijazah Jokowi dan polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Bener, sekarang, Pak Jokowi Sendirian, gak tau deh mau gak Pak SBY mendekat sambil nyanyi Kamu gak Sendirian," seloroh Hensa lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Di sisi lain, Hendri melihat hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mulai kembali mencair. Padahal, sebelumnya Prabowo kerap dinilai memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.

Founder lembaga survei Kedai-KOPI itu bahkan menyindir situasi tersebut melalui istilah diplomasi nasi goreng yang pernah menjadi simbol pertemuan dan komunikasi politik Prabowo-Megawati.

"Sebentar lagi akan ada nasi goreng jilid 2 Bu Mega dan Pak Prabowo," prediksi Hendri.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya mengenai pergeseran kedekatan politik di lingkar kekuasaan, ketika Jokowi dinilai mulai kehilangan sejumlah kawan politik, sementara komunikasi Prabowo dan Megawati berpeluang kembali menghangat.

EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

Harga BBM Pertamina Terbaru 1 November 2026 di Seluruh Indonesia, Cek Daftarnya

Oleh Van · 1 Nov, 15.54 WIB



Suasana tenang di sebuah SPBU Pertamina yang siap melayani kebutuhan bahan bakar kendaraan Anda.

Jakarta — Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina masih belum mengalami perubahan. Dilansir dari laman resmi Pertamina Minggu, (1/11/2026) tarif BBM subsidi maupun nonsubsidi masih mengacu pada harga yang berlaku sejak Rabu, (2/9/2026).

Dengan demikian, masyarakat yang hendak mengisi BBM di SPBU Pertamina hari ini masih akan menemukan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex berbeda berdasarkan wilayah.

Perbedaan harga tersebut salah satunya dipengaruhi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku, berikut rincian harga BBM Pertamina di berbagai wilayah Indonesia.

Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung

- Pertamina Dex: Rp25.750 per liter - Dexlite: Rp24.200 per liter - Pertamax Turbo: Rp20.000 per liter - Pertamax: Rp16.300 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

- Pertamina Dex: Rp26.300 per liter - Dexlite: Rp24.750 per liter - Pertamax Turbo: Rp20.450 per liter - Pertamax: Rp16.650 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

- Dexlite: Rp22.150 per liter - Pertamax: Rp14.950 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Batam

- Pertamina Dex: Rp23.950 per liter - Dexlite: Rp22.500 per liter - Pertamax Turbo: Rp18.550 per liter - Pertamax: Rp15.150 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur

Untuk wilayah Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat yang mencakup Kabupaten Bekasi, harga BBM Pertamina pada 1 November 2026 tercatat sebagai berikut:

- Pertamina Dex: Rp25.200 per liter - Dexlite: Rp23.700 per liter - Pertamax Turbo: Rp19.600 per liter - Pertamax Green 95: Rp19.150 per liter - Pertamax: Rp15.950 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Saham RANS Milik Raffi Ahmad Terpuruk! Ribuan Investor Angkat Kaki

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.11 WIB



BANDA ACEH - Saham PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) terpuruk hingga ribuan investor angkat kaki dalam 1 bulan terakhir. Harga saham perusahaan yang terafiliasi dengan pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut kini bergerak mendekati level terendah dalam 52 minggu terakhir.Berdasarkan data perdagangan Jumat (30/10/2026) saham RANS berada di level Rp108 per saham. Harga tersebut turun dari posisi pembukaan Rp109 dan sempat menyentuh level terendah Rp102, sementara level tertinggi-nya pada perdagangan hari itu mencapai Rp109.

Tekanan terhadap saham RANS terlihat lebih dalam jika dibandingkan dengan posisi tertingginya dalam 52 minggu terakhir yang mencapai Rp314 per saham. Dengan harga saat ini Rp108, saham RANS telah terkoreksi sekitar 65,6% dari level puncaknya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saham RANS masih kesulitan untuk kembali ke level tertinggi-nya. Bahkan, harga saat ini hanya terpaut Rp6 atau sekitar 5,9% dari level terendah 52 minggu yang berada di Rp102.

Di tengah tekanan harga saham tersebut, kapitalisasi pasar RANS tercatat sebesar Rp1,36 triliun. Sementara itu, rasio harga terhadap laba atau price to earnings ratio (P/E) berada di level 22,31 kali.

Saham emiten besutan pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini juga, menghadapi tekanan dari sisi basis investor. Jumlah pemegang saham perseroan terus menyusut sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juli 2026.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek, jumlah pemegang saham RANS tercatat sebanyak 126.253 investor per akhir September 2026. Angka tersebut merosot 21.843 investor atau 14,75% dibandingkan posisi akhir Agustus 2026 yang mencapai 148.096 investor.

Jika dibandingkan dengan saat pertama kali mencatatkan saham di bursa pada Juli 2026, penyusutannya jauh lebih tajam. RANS sebelumnya memiliki 754.691 investor saat awal melantai di BEI.

Artinya, sebanyak 628.438 investor telah meninggalkan saham RANS. Jumlah pemegang saham perseroan kini tersisa hanya 16,73% dari posisi awal pencatatan atau anjlok 83,27%.

SPORT

Pedro Acosta Juara Sprint Race MotoGP Malaysia 2026, Marc Marquez Kedua

Oleh Redaksi · 31 Okt, 14.41 WIB

BANDA ACEH, SEPANG – Pedro Acosta tampil sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Malaysia 2026 setelah melewati persaingan ketat di Sirkuit Internasional Sepang, Sabtu (31/10/2026). Pembalap Red Bull KTM tersebut mengamankan posisi terdepan, diikuti Marc Marquez dan Marco Bezzecchi yang melengkapi podium.

Acosta berhasil mengamankan kemenangan dengan keunggulan 0,578 detik atas Marc Marquez yang finis di posisi kedua. Sementara Marco Bezzecchi menempati urutan ketiga dengan selisih 1,310 detik dari sang pemenang.

Balapan berlangsung dinamis sejak awal. Alex Marquez yang memulai lomba dari pole position sempat memimpin jalannya sprint. Ia didampingi Ai Ogura dan Acosta di barisan depan saat start.

Namun, persaingan berubah pada putaran ketiga. Alex Marquez terjatuh di Tikungan 14 ketika masih berada di posisi terdepan. Insiden tersebut membuat pembalap Gresini Ducati itu gagal melanjutkan balapan dan membuka peluang bagi para pesaingnya.

Ai Ogura kemudian mengambil alih pimpinan lomba. Pembalap Trackhouse Aprilia itu berusaha mempertahankan keunggulan di tengah tekanan Acosta yang terus mendekat.

Situasi semakin menantang ketika cuaca di sekitar Sirkuit Sepang mulai berubah. Rintik hujan membuat bendera putih dikibarkan, sebagai tanda pembalap diperbolehkan masuk pit untuk mengganti motor dengan ban basah.

Sejumlah pembalap mengambil keputusan masuk pit. Jack Miller menjadi salah satunya, tetapi upayanya berakhir dengan kegagalan setelah motor pengganti yang akan digunakannya belum siap. Ia pun tidak dapat melanjutkan sprint.

Sementara itu, para pembalap di barisan depan memilih bertahan di lintasan. Keputusan tersebut membuat persaingan tetap berlangsung ketat, terutama antara Ogura dan Acosta yang saling berusaha menguasai posisi pertama.

Memasuki tiga putaran terakhir, Acosta berhasil mengambil alih pimpinan lomba dari Ogura. Marc Marquez kemudian ikut merangsek ke posisi kedua, disusul Bezzecchi yang juga berhasil melewati pembalap Jepang tersebut.

Ogura berupaya mempertahankan posisinya di tengah tekanan para pesaing. Namun, ia akhirnya harus puas finis di urutan keempat setelah kehilangan tempat di tiga besar.

Acosta mampu menjaga keunggulannya hingga garis finis. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint keduanya sepanjang musim MotoGP …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Tanggapan atas Surat Terbuka Forum Guru Besar Indonesia

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.10 WIB

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.H., S.T., M.H.((Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut bintang dua yang dikenal luas sebagai pakar hukum, pengamat, dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 25 Januari 2011 – 16 September 2013))

Surat Terbuka Forum Guru Besar Indonesia tertanggal 19 Oktober 2026 menarik kesimpulan yang terlalu jauh dari bunyi hukum dan fakta pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka. Surat itu membaca syarat "paling rendah tamat SMA" seakan-akan berarti "wajib memegang ijazah SMA", dan menutup mata terhadap jalur pendidikan luar negeri yang tidak melewati SMA.

Sebagai dokumen yang mengatasnamakan ratusan guru besar dan berbicara tentang "marwah konstitusi", surat itu semestinya memenuhi standar akademik paling dasar: membaca norma secara utuh dan menjawab argumen tandingan. Di dua hal itu surat ini gagal, dan karena itu patut disayangkan.

• Pasal 169 huruf r harus dibaca utuh

Pasal 169 huruf r UU 7/2017 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat". Ada tiga unsur yang tidak boleh dipisahkan:

• "Berpendidikan", bukan "berijazah SMA". Yang dinilai adalah tingkat pendidikan calon. "Paling rendah". SMA adalah batas bawah, bukan satu-satunya jenjang yang diterima. Lulusan S1 jelas berada di atas batas itu. "Atau sekolah lain yang sederajat". Pembentuk undang-undang sadar ada jalur pendidikan yang tidak bernama SMA.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Asing Kabur, Rupiah Terancam Rp. 22.000, Ekonom Senior Bongkar Masalah Ekonomi Prabowo

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.46 WIB



Melihat lebih dekat perbedaan fisik antara mata uang dolar Amerika Serikat dan Rupiah Indonesia.

BANDA ACEH - Kondisi perekonomian Indonesia mendapat sorotan tajam dari ekonom senior Ferry Latuhihin.

Ia menilai pasar keuangan nasional sedang menghadapi tekanan serius, ditandai dengan pelemahan rupiah, arus modal asing yang terus keluar, serta anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (31/10/2026), Ferry menyebut investor asing masih diliputi ketakutan untuk menanamkan modal di Indonesia.

Situasi tersebut, menurut dia, membuat arus keluar modal atau capital flight terus berlangsung dan menekan nilai tukar rupiah.

Ferry bahkan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi semakin dalam.

Ia menyinggung pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, yang sempat memperkirakan nilai tukar dolar AS bisa mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000.

Menurut Ferry, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya menyangkut peringkat kredit formal, melainkan juga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi nasional.

Ferry mengatakan, secara formal Indonesia memang masih mempertahankan status investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Moody's, Fitch, dan Standard & Poor's (S&P).

Namun, ia mengingatkan bahwa penilaian lembaga pemeringkat tidak selalu mencerminkan persepsi investor di pasar.

"Di mata investor de facto, bukan cuma non-investment grade, tetapi sudah disebut non-investable grade," ujar Ferry.

Ia menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena investor bukan hanya mempertimbangkan peringkat kredit, tetapi juga stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, dan kepercayaan terhadap pengelolaan pemerintahan.

Ferry juga menyoroti kejatuhan pasar saham Indonesia. Ia mengawali pembahasannya dengan menunjukkan kondisi IHSG yang mengalami tekanan hebat.

Dalam perdagangan Jumat (30/10/2026), IHSG sempat menyentuh level 4.979,34 atau jatuh di bawah angka psikologis 5.000, sebelum akhirnya ditutup pada posisi 5.075,05.

Tekanan pasar tersebut terjadi di tengah pelemahan rupiah dan aksi jual investor asing.

Menurut Ferry, kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar keuangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Selain membahas kondisi ekonomi, Ferry juga melontarkan kritik keras terhadap Pengamat Politik Rocky Gerung yang dinilainya terlalu keras membela program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ferry menyebut Rocky seolah-olah sedang menebarkan logika yang keliru ketika menanggapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menegaskan, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah tidak berarti menuduh pemerintah sengaja meracuni rakyatnya sendiri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Persiapan Penilaian Adipura 2026, Pemko Banda Aceh Gelar Rapat Koordinasi

Oleh Redaksi · 31 Okt, 12.48 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh mematangkan persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026. Rapat koordinasi dilaksanakan di Balai Keurukon, Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh Bachtiar, Kepala DLHK3 Kota Banda Aceh Hamdani, seluruh Kepala OPD, para Camat, Keuchik, dan unsur terkait lainnya.

Agenda rapat membahas strategi dan komitmen bersama dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota menjelang penilaian nasional tersebut.

Dalam arahannya, Bachtiar menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan kota bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3), melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

"Menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota adalah tugas kita bersama. Dengan keterbatasan tenaga yang ada, kita harus melibatkan masyarakat secara kolektif," ujar Bachtiar.

Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk memulai gerakan kebersihan dari lingkungan terkecil.

"Marilah kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita sendiri, mulai dari lingkungan rumah hingga pekarangan," imbaunya.

Sementara itu, Kepala DLHK3 Kota Banda Aceh Hamdani menyampaikan bahwa pada penilaian Adipura 2025, Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan kategori pembinaan. Banda Aceh tercatat sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang meraih kategori tersebut.

"Kategori pembinaan ini merupakan kategori terbaik pada penilaian tahun lalu. Alhamdulillah, hingga saat ini Kota Banda Aceh telah 11 kali meraih penghargaan Adipura," jelas Hamdani.

Untuk tahun 2026, Pemko Banda Aceh menargetkan capaian yang lebih tinggi.

"Insyaallah, kita berharap pada kesempatan ke-12 ini Kota Banda Aceh dapat meraih Adipura Kencana. Memang cukup berat, namun kita akan berusaha semaksimal mungkin," tegasnya.

Hamdani mengimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan kota.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Banda Aceh untuk menjaga kebersihan bersama, minimal dengan menjaga lingkungan masing-masing dan mulai memilah sampah dari sumber," katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

3 BERITA

OPINI

Gibran Lebih Baik Mundur Saja

Oleh Redaksi · 1 Nov, 07.09 WIB



Gibran Rakabuming Raka tampak fokus saat menjalankan tugas resminya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

0leh: Rusdianto Samawa((Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram))

UTUSAN MA 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket Penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah, apakah otomatis dimakzulkan?

Putusan ini besar secara hukum: Baik Perdata dan Pidana. Bahkan, DPR memiliki Hak Penuh untuk segera sidang Paripurna pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena, telah memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan paripurna.

Dua lembaga peradilan hukum tertinggi di Indonesia, sudah memutuskan: Suket tidak Sah dan Suket Bukan Ijazah, alias Ijazah belum ditemukan.

Ternyata, negara dan struktur pemerintahan, mulai sadar bahwa masa 10 tahun Jokowi: Demokrasi terjual, tergadai, immorality, dan rusak.

DPR tidak perlu membuat angket untuk perpanjang masa jabatan Gibran. DPR segera agendakan Paripurna langsung untuk menggulingkan Wakil Presiden: Perusak Demokrasi Ini.

Berdasarkan pemberitaan Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.

Dengan Amar putusannya: "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya."

Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 ini menguji keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan No. 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka. Majelis kasasi diketuai Ketua Kamar TUN Yulius dengan anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi menyatakan suket itu tidak sah dan batal demi hukum.

Penggugat sendiri mengajukan 3 petitum: mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, dan meminta dokumen tersebut ditarik dari Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Putusan ini, menguatkan putusan MK sebelumnya. Penggugat menyebut MA sejalan dengan MK bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SMA seperti di Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Memang benar, perkara tersebut adalah perkara Tata Usaha Negara (TUN), bukan perkara Pemilu. Namun, putusan hakim memiliki tingkat keadaban moral yang kuat. Tentu, berdampak pada tuntutan pidana atas pemalsuan surat palsu, Pelanggaran administratif, pelanggaran perdata atas kerugian negara dalam pembiayaan pemilu.

Negara telah kecolongan, membiayai Pemilu 2024 atas Calon Bodong Palsu dalam bursa Pilpres 2024 yang lalu. Walaupun, putusan yang dibatalkan MA adalah produk administrasi: Surat Keputusan Dirjen tentang penyetaraan ijazah. Objek gugatannya adalah KTUN. Tetap kesimpulannya: Calon Palsu, Surat Palsu.

Putusan MA juga, tidak batalkan: Keputusan KPU No. 360/2024 tentang penetapan hasil Pilpres dan Keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Prabowo- Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Dulu Melenggang Menuju Istana, Kini Konstitusi Menagih Jawaban: Ironi Jalan Politik Gibran

Oleh RADIT FABIAN · 1 Nov, 15.35 WIB



Isu keaslian ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh: Radit Fabian((Kadiv Analisis Hukum & Kebijakan Publik IMAMAH FH UII))

DA ironi yang menarik untuk direnungkan dalam perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menuju kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jalan menuju kekuasaan yang dahulu dipenuhi kontroversi hukum dan perdebatan konstitusional dalam ruang publik, kini kembali menjadi ruang pengujian oleh lembaga peradilan akhir.

Seolah-olah persoalan yang pernah dianggap selesai melalui prosedur politik dan administrasi negara ternyata belum sepenuhnya menemukan titik akhir dalam perspektif hukum.

Publik tentu masih mengingat bagaimana perjalanan politik Gibran menjelang Pemilihan Presiden 2024 diwarnai kontroversi perubahan norma batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memberikan alternatif persyaratan usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Persoalan tidak berhenti pada perubahan norma tersebut. Proses pengambilan putusan juga melahirkan kontroversi etik yang serius.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), melalui putusannya pada November 2023, menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai independensi kekuasaan kehakiman, konflik kepentingan, dan pentingnya menjaga imparsialitas lembaga pengawal konstitusi.

Dalam konteks ini, persoalan yang patut dikritisi bukan semata-mata siapa yang memperoleh keuntungan politik dari perubahan norma, melainkan bagaimana kewenangan konstitusional sebuah lembaga peradilan dapat dipergunakan dalam proses perubahan tafsir hukum yang memiliki konsekuensi politik begitu besar.

Konstitusi seharusnya menjadi pembatas kekuasaan, bukan justru menjadi ruang yang membuka persepsi publik bahwa hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan kontestasi politik.

Kini, menjelang akhir Oktober 2026, perjalanan politik Gibran kembali menjadi sorotan setelah muncul dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedua putusan tersebut memiliki objek perkara, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Namun, keduanya bertemu pada satu persoalan mendasar: pemenuhan persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Perkara ini tidak tepat dipandang semata-mata sebagai upaya menjatuhkan hukuman politik terhadap seorang Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Supremasi Politik Jokowi: Beban Elektoral Gibran

Oleh Redaksi · 1 Nov, 08.52 WIB



Potret Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo dalam satu bingkai.

Oleh: Abdul Khalid Boyan((Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW))

ALAM diskursus Politik modern, transmisi kekuasaan antar-generasi kerap dibungkus dengan terminologi rejuvinasi atau keberlanjutan kepemimpinan.

Namun, berbeda perkara dengan apa yang menimpa Gibran Rakabuming Raka dalam lanskap politik Indonesia. Ia tidak sekadar urusan melanjutkan tongkat estafet--ia juga memikul apa yang dalam sosiologi politik dikenal sebagai modal politik warisan (inherited political capital) yang tidak hanya menjadi daya dorong utama, melainkan juga jangkar yang menambatnya dalam bayang-bayang supremasi kekuasaan sang ayah, Joko Widodo.

Beban terbesar Gibran bukanlah ketidaksiapan birokrasi atau kurangnya pengalaman teknis pemerintahan, melainkan kenyataan sosiologis bahwa Jokowi di samping adalah bapak biologis, namun sekaligus sebagai bapak ideologisnya.

Dalam analisis sosiologi politik Pierre Bourdieu, modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki seorang tokoh tidak dapat secara otomatis dikonversi secara menyeluruh kepada ahli warisnya tanpa batas.

Sehebat-hebatnya performa seorang anak politisi, persepsi publik yang terstruktur oleh budaya patriarki politik cenderung menempatkannya sebagai subordinated figure--sebuah entitas yang dianggap masih "ingusan" di bawah naungan gurita kekuasaan sang ayah.

Masyarakat, dengan ingatan kolektif yang pekat akan era 10 tahun kepemimpinan Jokowi, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melepaskan persona Gibran dari hegemoni politik bayang-bayang (shadow politics) orang tuanya.

Dinamika ini menandai tantangan besar yang akan terus menghantui perjalanan politik Gibran, baik selama memegang mandat pemerintahan maupun saat menyongsong kalkulasi elektoral menuju Pemilu 2029.

Ada beberapa variabel sosiologis-politik yang memperte-gas kompleksitas posisi tersebut.

Ketergantungan pada Patronase

Dalam konteks ini, secara sosiologis, nasib dan akselerasi karier politik Gibran sangat ditentukan oleh supremasi politik serta jejaring patron-klien (patron-client relationships) yang dibangun Jokowi selama satu dekade terakhir.

Supremasi politik Joko Widodo (Jokowi) merujuk pada dominasi pengaruh, jejaring kekuasaan, dan manuver politik yang dibangun oleh Presiden ke-7 RI tersebut--baik selama dua periode masa jabatannya (2014-2024) maupun pasca-lengser dari tampuk kepresidenan.

Pada awal kepemimpinannya, Jokowi menampilkan citra pemimpin yang merakyat, bersih dari bayang-bayang Orde Baru, dan fokus pada pembangunan fisik seperti ribuan kilometer jalan tol dan jalan raya.

Melalui pendekatan itu, Jokowi berhasil merengkuh tingkat kepuasan publik yang tinggi--di mana pada gilirannya menjadi modal elektoral kuat bagi dirinya dan kelompok politik di sekitarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

3 BERITA

SPORT

Tak Terbendung di Sepang, Marc Marquez Juara MotoGP Malaysia 2026

Oleh Redaksi · 1 Nov, 15.25 WIB



BANDA ACEH, SEPANG – Marc Marquez tampil impresif dengan meraih kemenangan pada balapan MotoGP Malaysia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (1/11/2026). Pebalap Ducati Lenovo Team itu berhasil mengungguli Pedro Acosta dan Alex Marquez dalam persaingan sengit sepanjang 20 lap.

Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing finis di posisi kedua dengan selisih waktu 4,172 detik dari Marc. Sementara itu, Alex Marquez yang memperkuat BK8 Gresini Racing MotoGP harus puas menempati posisi ketiga, terpaut 5,955 detik dari sang pemenang.

Balapan langsung menyajikan persaingan ketat sejak lampu start dipadamkan. Marc dan Alex Marquez menjadi dua pebalap yang langsung bersaing di barisan terdepan saat memasuki tikungan pertama.

Marc mampu mengambil alih kendali balapan dan mempertahankan posisi terdepan. Alex terus memberikan tekanan dari belakang, sedangkan Ai Ogura mengawali lomba dengan menempati posisi ketiga.

Enea Bastianini juga menunjukkan start menjanjikan. Pebalap KTM tersebut berada dalam persaingan barisan depan bersama Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi yang berusaha memperbaiki posisi pada putaran-putaran awal.

Memasuki lap keempat, Marc mulai membangun jarak dengan para pesaingnya. Ia unggul 0,491 detik atas Alex, sedangkan Acosta membayangi keduanya dengan selisih 0,587 detik dari pemimpin balapan.

Marc kemudian meningkatkan kecepatan dan mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 59,7 detik. Keunggulannya atas Alex semakin melebar hingga sekitar 0,6 detik.

Di sisi lain, Acosta terus menjaga jarak dengan Alex. Pebalap KTM itu terlihat konsisten membangun peluang untuk masuk ke posisi kedua, sembari mempertahankan kecepatannya di tengah persaingan ketat.

Memasuki lap ke-10 dari total 20 putaran, Marc masih kokoh di posisi pertama. Alex berada di urutan kedua, disusul Acosta. Marco Bezzecchi dan Ai Ogura melengkapi posisi lima besar.

Persaingan perebutan podium semakin menarik ketika Acosta mulai meningkatkan tekanannya terhadap Alex. Upayanya akhirnya membuahkan hasil setelah ia berhasil melakukan manuver menyalip di tikungan sembilan.

Manuver tersebut mengantarkan Acosta ke posisi kedua, sekaligus membuat Alex turun ke urutan ketiga. Perubahan posisi itu menjadi salah satu momen penting dalam persaingan podium MotoGP Malaysia tahun ini.

Sementara itu, Marc semakin sulit dikejar. Pebalap asal Spanyol tersebut mampu menjaga konsistensi dan memperlebar jarak dengan Acosta hingga mendekati dua detik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Veda Ega Naik Podium di Sepang, Ini Komentar Usai Finis Kedua

Oleh Van · 1 Nov, 16.16 WIB



Momen kemenangan gemilang di podium Petronas Grand Prix Malaysia 2026, merayakan perjuangan dan keberhasilan para pebalap terbaik!

Jakarta — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil finis di posisi kedua pada balapan Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11/2026). Veda mengamankan podium setelah melewati persaingan ketat dengan sejumlah pembalap, sementara Maximo Quiles keluar sebagai pemenang.

Quiles yang memperkuat CFMOTO Gaviota Aspar Team menyelesaikan balapan dengan keunggulan 3,734 detik atas Veda. Adapun posisi ketiga ditempati Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo, sedangkan pembalap tuan rumah Hakim Danish finis keempat.

Hasil tersebut menjadi podium kedua Veda sepanjang musim Moto3 2026. Sebelumnya, pembalap Honda Team Asia itu juga finis ketiga pada Grand Prix Brasil, Maret lalu.

Persaingan Ketat di Sepang Veda mengawali balapan dari posisi kesembilan. Namun, pada putaran pertama, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut mampu memperbaiki posisinya hingga masuk kelompok lima besar.

Persaingan di barisan depan melibatkan David Almansa, Maximo Quiles, Alvaro Carpe, Hakim Danish, dan Veda. Posisi mereka beberapa kali berubah akibat aksi saling menyalip sepanjang 15 lap.

Quiles mulai mengambil alih pimpinan balapan setelah melewati Almansa pada lap kelima. Setelah itu, pembalap Spanyol tersebut mampu menjaga jarak dari para pesaingnya dan perlahan membangun keunggulan.

Sementara itu, perebutan posisi kedua berlangsung lebih ketat. Veda harus bersaing dengan Carpe, Danish, dan Almansa untuk mendapatkan tempat di podium.

Memasuki tiga lap terakhir, Veda berhasil melewati Almansa dan naik ke posisi kedua. Meski sempat mendapat tekanan dari Carpe dan Danish pada lap terakhir, posisinya tidak berubah hingga garis finis.

Usai balapan, Veda mengaku senang bisa meraih podium di Sepang. Terlebih, keluarganya datang langsung untuk menyaksikan balapan tersebut.

"Alhamdulillah, saya sangat senang bisa meraih podium di sini, di Sepang. Terutama karena seluruh keluarga saya, ayah, ibu, saudara perempuan, dan sepupu datang ke sini. Saya berhasil meraih podium di depan mereka, ini benar-benar luar biasa," ujar Veda usai balapan dalam wawancara MotoGP.

Veda juga menyinggung batalnya balapan di Phillip Island, Australia, pekan sebelumnya, meski dirinya berhasil meraih pole position.

Sementara itu, Maximo Quiles mengaku puas dengan hasil yang diraihnya di Sepang. Pembalap yang sudah memastikan gelar juara dunia Moto3 2026 tersebut menyebut datang dengan motivasi besar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Demam Futsal Berkobar! ZP Ramen Sabet Juara AFK Langsa Cup 2026

Oleh Redaksi · 1 Nov, 00.17 WIB



LANGSA - Gelaran bergengsi AFK Langsa Cup 2026 resmi tuntas dengan gemilang.

Turnamen futsal yang berlangsung di GG Mini Soccer Kota Langsa sejak 24-31 Oktober 2026 membangkitkan kembali gairah olahraga si kulit rotan di Kota Langsa ini sukses menyita perhatian pencinta sepak bola lokal, ditandai dengan aksi-aksi sengit di atas lapangan hingga laga puncak.

Pada partai final yang menegangkan, ZP Ramen tampil sebagai penguasa usai membungkam LKS FC dengan skor meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan ZP Ramen sebagai juara pertama, sementara LKS FC harus puas berada di tempat kedua.

Tak kalah seru, perebutan tempat ketiga mempertemukan EX SMANSA melawan Polres Langsa.

Lewat duel ketat berbalas serangan, EX SMANSA sukses mengamankan podium ketiga usai menang tipis dengan skor 2-1.

Ajang ini tidak hanya melahirkan tim juara, tetapi juga menterengkan nama-nama individu berbakat yang tampil luar biasa sepanjang turnamen:

• Best Player: Vani Al Wahaby (Nomor Punggung 1 dari ZP Ramen) yang tampil tangguh di bawah mistar sekaligus motor permainan tim.

• Top Scorer: Siddiq Indra (Nomor Punggung 55 dari Polres Langsa) yang keluar sebagai pencetak gol terbanyak berkat ketajamannya di lini depan.

Ketua Panitia AFK Langsa Cup 2026, Wahyu Ramadana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi dan menjaga sportivitas selama kompetisi berlangsung.

“Pertandingan telah selesai digelar. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi. Tetap junjung tinggi sportivitas di dalam lapangan pada event-event olahraga selanjutnya. Jaya.. jaya.. jaya!” ujar Wahyu penuh semangat saat menutup AFK Langsa Cup 2026, Minggu, 1 November 2026.

Senada dengan hal tersebut, Ketua AFK Langsa, M. Bayu Setiawan, berharap turnamen ini menjadi tonggak kebangkitan prestasi futsal di Kota Langsa.

Ia optimis dari ajang seperti inilah bibit-bibit atlet muda berbakat akan lahir dan siap mengharumkan nama daerah di kancah regional Aceh hingga tingkat nasional.

“Saya harap AFK Langsa Cup 2026 bisa melahirkan bibit baru yang membawa harum nama Kota Langsa dan semoga olahraga futsal semakin maju ke depannya. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berpartisipasi dan mengedepankan sportivitas. Salam olahraga, AFK Langsa.. Juara.. juara.. juara!” pungkas Bayu.[fr/aw]

ANEKA BERITA

6 BERITA

INTERNASIONAL

Ganas! Iran Hantam 26 Pangkalan Militer AS di Timur Tengah dengan 115 Serangan

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.43 WIB



Asap tebal menyelimuti bangunan yang hancur parah, memperlihatkan skala kerusakan di lokasi tersebut.

BANDA ACEH - Amerika Serikat (AS) perlu mewaspadai kemampuan militer Iran setelah serangan Teheran terbukti merusak puluhan pangkalan dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Iran bahkan melancarkan lebih dari 115 serangan drone dan rudal yang menghantam 26 pangkalan serta lokasi yang menampung peralatan militer AS.

Temuan tersebut diungkap dalam analisis kantor berita Associated Press (AP) yang dipublikasikan pada Sabtu (31/10/2026). AP meneliti gambar satelit dari sejumlah penyedia serta mewawancarai pejabat regional yang mengetahui kerusakan di lokasi-lokasi tersebut.

Data yang dihimpun mencakup serangan hingga Agustus 2026. Serangan-serangan yang diklaim dilakukan Iran maupun kelompok yang didukung Teheran itu menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas militer AS rusak atau hancur.

Lokasi yang terdampak tersebar di delapan negara, yakni Kuwait, Bahrain, Irak, Yordania, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Serangan Iran Sasar Radar hingga Pesawat Militer

Iran pada awalnya memusatkan serangan terhadap sistem peringatan dini dan pertahanan udara AS. Target tersebut berfungsi mendeteksi serta mengantisipasi serangan rudal dan drone.

Setelah itu, serangan meluas ke berbagai fasilitas lain, termasuk pesawat, hanggar, gudang, pusat komunikasi, instalasi bahan bakar, hingga tempat tinggal personel militer.

Di Kuwait, Pangkalan Udara Ali Al Salem menjadi salah satu lokasi paling sering diserang. Pangkalan tersebut dihantam setidaknya 30 kali, mengakibatkan sedikitnya 15 hanggar pesawat rusak atau hancur. Sejumlah gudang dan 10 bangunan di dekat kawasan permukiman juga terdampak.

Pangkalan Camp Buehring di Kuwait mengalami kerusakan lebih luas. Sebagian besar hanggar pesawat di fasilitas tersebut dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas pendukung personel, termasuk pusat kebugaran, toko, garasi, dan ruang makan, turut mengalami kerusakan.

Serangan paling mematikan terhadap personel AS dalam perang tersebut terjadi di Kuwait. Sebanyak enam tentara AS tewas ketika sebuah drone menghantam Port Shuaiba pada 1 Maret 2026.

AS Pindahkan Sejumlah Aset dari Teluk Persia

Kerusakan di berbagai pangkalan itu turut memengaruhi kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah. Dua pejabat regional mengatakan kepada AP bahwa militer Amerika telah memindahkan banyak asetnya dari kawasan Teluk Persia.

Aset yang dipindahkan mencakup pesawat, sistem pertahanan udara, serta perlengkapan penting untuk mendukung operasional pangkalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Banjir Terus Berulang, Win Farhan Desak Pemkab Aceh Tenggara Bentuk Tim Ahli

Oleh Redaksi · 1 Nov, 12.02 WIB



Potret seorang mahasiswa yang bangga mengenakan almamater di depan Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kuala. Semangat dan optimisme terpancar jelas menyambut masa

BANDA ACEH, ACEH TENGGARA – Banjir yang terus berulang di Desa Kuning 1, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum ditangani secara serius dan menyeluruh. Masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang sama, sementara penyelesaian jangka panjang belum memberikan kepastian.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus putra asli Desa Kuning 1, Win Farhan Afdillah, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengevaluasi pola penanganan banjir yang selama ini berjalan. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati memimpin koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Sekretaris Daerah, DPRK, perangkat daerah teknis, camat, pemerintah desa, serta instansi pemerintah pusat dan provinsi.

"Banjir di Kuning 1 bukan persoalan baru. Jika kejadian yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, pemerintah harus berani mengevaluasi cara penanganannya. Jangan sampai setiap banjir datang, pemerintah kembali melakukan pendataan dan rapat, tetapi masyarakat tetap menjadi korban," tegas Win.

Berdasarkan catatan pemberitaan, banjir pada 13 September 2026 melanda 12 desa di enam kecamatan dengan 363 kepala keluarga atau 1.324 jiwa terdampak. Pada 24 September 2026, banjir kembali membawa lumpur dan kayu hingga menggenangi jalan nasional dengan ketinggian sekitar 35–45 sentimeter.

Persoalan serupa juga tercatat terjadi pada Mei 2022, November 2022, Oktober 2024, Desember 2024, dan Februari 2025. Bahkan, penyumbatan jembatan telah menjadi persoalan sejak 2022.

"Empat tahun bukan waktu yang singkat untuk mengenali persoalan. Jika penyebab banjir terus berulang, yang harus dipertanyakan adalah keseriusan, koordinasi, dan efektivitas kebijakan pemerintah," ujarnya.

Desak Pembentukan Tim Ahli Penanganan Banjir

Win mendorong Pemkab Aceh Tenggara segera menginisiasi pembentukan Tim Ahli Penanganan Banjir dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli lintas disiplin.

Tim tersebut perlu melibatkan ahli hidrologi dan DAS, teknik sumber daya air, teknik sipil dan infrastruktur, lingkungan dan tata ruang, kebencanaan, serta perencanaan wilayah dan kebijakan publik.

Pembentukan tim bertujuan mengidentifikasi akar persoalan banjir, mengkaji sedimentasi dan kapasitas sungai, mengevaluasi kondisi jembatan serta infrastruktur, hingga merumuskan strategi mitigasi dan penanganan jangka panjang.

Tim ini juga harus menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, BWS Sumatera I, dan perguruan tinggi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Prancis Rusuh Lagi! Ratusan Ribu Demonstran Bentrok dengan Polisi di Unjuk Rasa Pekan Ke-3

Oleh Redaksi · 1 Nov, 09.04 WIB



BANDA ACEH - Prancis kembali diguncang demonstrasi besar-besaran yang berujung rusuh, Sabtu (31/10/2026). Ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota memprotes tingginya biaya hidup serta perbaikan kondisi pendidikan.

Ini merupakan demonstrasi akhir pekan ketiga berturut-turut di Prancis. Polisi menembakkan gas air mata di Paris dan Lyon ke arah ribuan orang yang didominasi anak muda.

Koalisi organisasi pemuda yang mewakili para siswa SMA dan mahasiswa, serta serikat pekerja, mengeklaim demonstrasi diikuti hampir 500.000 orang, termasuk 200.000 di Paris.

Sementara pihak berwenang memperkirakan jumlah demonstran di seluruh kota mencapai 320.000, termasuk 70.000 di Paris.

Seperti pada unjuk rasa sebelumnya, demonstrasi di Paris awalnya berlangsung damai, namun berubah menjadi kekerasan ketika massa berkumpul di dekat titik terakhir long march. Mereka membakar tempat sampah dan barang-barang di jalanan, membuat kepulan asap membubung di langit Paris.

Petugas memperingatkan melalui pengeras suara mereka akan menembakkan lebih banyak gas air mata demonstran tidak membersihkan jalan.

Sementara itu petugas medis mengevakuasi massa yang luka. Di saat yang sama para pengunjuk rasa mengangkat tangan ke arah polisi sebagai tanda mereka tidak bermaksud jahat.

Puluhan orang bertopeng yang mengenakan hoodie dan membawa palu untuk mencongkel paving block untuk melemparnya ke polisi di pinggiran Paris.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mengungkap, setidaknya 290 demonstran ditangkap di seluruh kota.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez memperingatkan terjadinya kerusuhan risiko yang sangat tinggi, terutama setelah gelap pada malam Halloween.

Pemerintah menegaskan telah mendengar tuntutan para pengunjuk rasa.

Perdana Menteri Sebastien Lecornu telah bertemu dengan serikat pelajar dan mahasiswa pekan ini dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meringankan biaya hidup.

Demonstrasi pecah di Prancis sejak bulan lalu, awalnya siswa SMA memprotes buruknya kondisi pendidikan, seperti bangunan sekolah terbengkalai, kekurangan guru, serta sistem penerimaan masuk universitas yang dianggap tidak adil bagi siswa kurang beruntung. Setelah itu, serikat-serikat buruh bergabung dengan menambah agenda, yakni terkait biaya hidup.

Demonstrasi menjalar ke berbagai kota di seluruh Eropa. Kaum muda di Jerman menjadi yang terbaru bergabung dalam aksi tersebut.

Ribuan orang berunjuk rasa, sementara polisi di Cologne membubarkan massa menggunakan meriam air. Mereka menuntut lonjakan biaya hidup, pemangkasan anggaran pendidikan, dan rencana wajib militer.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Bakar Hutan Dulu, Proyek Daur Ulang Kemudian

Oleh Rut sw · 1 Nov, 16.15 WIB



Mengubah limbah kelapa sawit menjadi energi bersih sebesar 3,9 GW untuk masa depan berkelanjutan.

RESIDEN menerima laporan dari Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, terkait potensi pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas, energi listrik, hingga alternatif gas LPG.

Setiap tahunnya, ada kurang lebih 328,43 juta ton tandan buah sawit (TBS). Sementara, jumlah Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair dari sawit berjumlah 229,9 juta meter kubik atau liter.

Dari potensi limbah itu, kata Arif, jika dikonversikan menjadi listrik bisa mencapai kurang lebih 3,9 gigawatt.

Dan masih ada potensi lainnya yaitu dikonversi menjadi gas dalam tabung yang bisa dipakai masyarakat.

Selama ini pemerintah mengimpor LPG kurang lebih 97 triliun per tahun, dengan adanya biogas yang bisa dikonversi menjadi gas dalam tabung bisa menjadi salah satu solusi energi ke depannya.

Kapitalisme Hanya Butuh Cuan

Sebenarnya potensi negara ini tidak dari limbah sawit saja. Jika disebutkan ada ribuan tambang dan energi, minyak dan gas, kekayaan laut dan lainnya.

Sayang, semua itu hanya ada dalam hitungan korporasi dan peta wilayah, sementara secara zatnya sudah diprivatisasi oleh korporasi.

Bicara sawit pun, ada 731–751 perusahaan yang tergabung secara aktif sebagai anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang tersebar di 16 provinsi sentra sawit.

Pabrik dan perkebunan sawit paling banyak terkonsentrasi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, antara lain di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan Kalimantan Selatan yang hari ini mengalami karhutla berbulan-bulan.

Dua perusahaan top atas di antaranya PalmCo (PTPN Group / BUMN) yang menguasai 586.000 hektare (tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi).

Kemudian Sinar Mas Group (Golden Agri-Resources / PT SMART Tbk) yang menguasai 530.000 hingga lebih dari 536.000 hektare.

Secara kepemilikan, Palmco memang perusahaan milik negara, tapi ia gabungan beberapa PTPN, sedangkan Sinar Mas Grup hanya milik satu pengusaha yaitu keluarga Wijaya.

Secara akal sehat, bagaimana bisa satu perusahaan bisa menguasai lahan luas hanya untuk sawit jika tidak dekat dengan ring penguasa?

Pola Reuse dalam pengelolaan limbah sawit jelas mendatangkan keuntungan finansial yang cepat dibandingkan dengan konservasi hutan yang seolah jadi kekayaan tak bergerak atau tak produktif.

Namun ketika hak konsesi diberikan, perusahaan yang dimaksud seketika akan profit oriented, mindset mereka hanya bagaimana caranya mengembalikan modal menjadi keuntungan yang mengalir deras tanpa berhenti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Raffi Ahmad Tegaskan Terima Semua Kritik Publik: Jadi Pembelajaran bagi Saya

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.43 WIB



BANDA ACEH - Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad memastikan dirinya terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat menyusul polemik kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Raffi Ahmad mengaku menghargai setiap aspirasi, pandangan, hingga saran yang disampaikan publik. Dia bahkan menyebut berbagai kritik tersebut sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri.

Hal itu disampaikan Raffi melalui video klarifikasi terbaru yang diunggah di akun Instagram resmi @ukp_mudaseni_raffiahmad, Minggu (1/11/2026).

"Saya menghargai setiap orang yang menyampaikan aspirasinya, kritiknya, pandangannya, sarannya, semuanya saya hargai karena saya sangat meyakini bahwa setiap orang memiliki cara untuk berkontribusi dan memberikan apa pun yang terbaik dengan cara masing-masing untuk bangsa dan negara," tutur Raffi.

Suami Nagita Slavina itu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, kritik dan masukan yang diterima menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi.

"Terima kasih sekali lagi atas perhatian, kritik, dan masukan yang diberikan. Semuanya ini pastinya menjadi pembelajaran bagi saya untuk terus memperbaiki diri," kata Raffi.

Dalam video yang sama, Raffi juga kembali menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul. Dia menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda tersebut hanya sebagai tamu undangan.

Raffi menjelaskan, menghadiri undangan siapa pun sudah menjadi kebiasaannya sejak lama. Dia selalu berusaha menyempatkan diri untuk hadir meskipun hanya sebentar.

"Sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu di setiap ada undangan siapa pun yang mengundang saya, insyaAllah saya selalu mengupayakan untuk hadir walaupun sebentar," ujarnya.

Namun, Raffi menyadari bahwa niat baik untuk menghadiri sebuah kegiatan tetap harus disertai ketelitian. Dia pun berjanji akan lebih berhati-hati dan memahami informasi secara mendalam sebelum mengambil keputusan untuk menghadiri suatu acara.

Dia berharap penjelasan yang disampaikannya dapat membantu masyarakat memahami situasi sebenarnya terkait kehadirannya dalam kegiatan tersebut.

"Saya berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu memperjelas situasi yang sebenar-benarnya terjadi, sekaligus ini menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak termasuk saya," pungkasnya.

Sebelumnya, acara Deklarasi Sumpah Pemuda yang digelar Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 menjadi sorotan publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Akun X Brown Bear @nutellabear Viral, Netizen: Serem Banget Jir…

Oleh Redaksi · 1 Nov, 14.35 WIB



BANDA ACEH – Akun X (Twitter) bernama Brown Bear dengan username @nutellabear mendadak viral di kalangan warganet Indonesia. Akun berfoto profil kucing oranye ini tercatat bergabung sejak Desember 2013, mencantumkan lokasi DKI Jakarta, dan sempat memiliki sekitar 47 ribu pengikut sebelum kemudian dinonaktifkan atau dihapus setelah ramai dibicarakan.Sebagian besar unggahan yang beredar berasal dari tahun 2023 dan berisi curahan hati serta pesan bernada romantis atau vulgar untuk sosok yang disebut “Doi” atau “Pak Boss”. Salah satu yang paling banyak disebar adalah unggahan ucapan hari jadi bertuliskan “happy 3 years Pak Boss imy”. Selain itu, beredar tangkapan layar unggahan lama dari Juni 2014 yang menampilkan foto Prabowo Subianto disertai keterangan bernada vulgar. Sejumlah unggahan lain dari akun tersebut juga bermuatan seksual.

Setelah viral, akun tersebut menghilang dari platform.

Komentar Curiga dan Cocokologi Netizen

Warganet ramai melakukan cocokologi dan mengaitkan akun tersebut dengan pejabat Istana . Alasan yang beredar antara lain bio akun yang mencantumkan 169/94 yang dianggap cocok dengan fisik tinggi dan berat badan, indikasi terkait Manado (tempat lahir pejabat itu), serta timing unggahan “3 tahun” di 2023 yang dicocokkan dengan masa bekerja dekat dengan Prabowo.

Berikut sejumlah komentar netizen yang mencerminkan kecurigaan:

- “Jujur fikiran saya lgsg mengarah ke dia,, yg lg ngambek itu”
- “Buna ted”
- “Bjirs ini seriusan punya teddy si BROWN BEAR? serem banget jir klo beneran”

Namun, tidak semua setuju. Ada yang skeptis:

- “RAME BANGET BAHAS NUTELLABEAR... menurut gue sih bukan dia ya, terlalu cocokologi aja kita. ‘SAYA SEORANG SUAMI DAN SEORANG AYAH’... bunted nikah 2018, itu postingan nutellabear 2014.”
- “bubar nutellabear bukan bunted ayo balik bahas demo...”
- “Ayooo awas fitnah”

Hingga saat ini, identitas pemilik akun Brown Bear belum terverifikasi. Tidak ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Penghapusan akun juga tidak serta-merta menjadi bukti kepemilikan, karena bisa disebabkan suspend, mass-report, atau keputusan pemilik sendiri setelah viral.

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin